



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI XI DPR RI**

Tahun Sidang : 2018-2019
Masa Persidangan : IV
Rapat ke- : 7
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Keuangan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 18 Juni 2019
Waktu : 10.00 WIB s.d 14.15 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI
Ketua Rapat : Melchias Markus Mekeng
Sekretaris Rapat : Drs. Urip Soedjarwono
Acara : Pembahasan RKA/KL Tahun 2020
Hadir : **PEMERINTAH:**

1. MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI)
2. WAKIL MENTERI KEUANGAN RI (MARDIASMO)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (MELCHIAS MARKUS MEKENG/F-PG/KETUA KOMISI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pag dan salam sejahtera untuk kita semua,
Om swasti astu,
Namo budaya,
Salam kebajikan.

Yang terhormat Menteri Keuangan beserta jajarannya,
Yang terhormat Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI,
Dan hadirin yang berbahagia.

Menurut catatan yang kami terima dari Sekretariat daftar hadir telah ditandatangani oleh 9 orang Anggota Komisi dan 7 Fraksi, serta ijin 3 orang. Oleh karena itu, sesuai Pasal 251 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI ijin kami membuka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Mengawali Rapat Kerja kita pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puuji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melakukan Rapat Kerja bersama. Agenda Rapat Kerja pada hari ini adalah pembahasan pagu indikatif, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan KEM dan PPKF Tahun 2020, pagu indikatif Kementerian Keuanga dialokasikan sebesar Rp44.394, miliar yang akan digunakan:

1. Program dukungan manajemen dan melaksanakan tugas teknis.
2. Program pengawasan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Keuangan.
3. Program pendidikan, program pengolahan anggaran, program peningkatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah.
4. Program pengolahan perbendaharaan negara.
5. Program pengolahan kekayaan negara.
6. Penyelesaian piutang negara dan pelayanan lelang.
7. Program perumusan kebijakan fiskal.
8. Program peningkatan dan pengamanan pajak.
9. Program pengawasan pelayanan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai.
10. Program pengelolaan, pembiayaan, dan resiko.
11. Program pelayanan perijinan ekspor dan impor melalui portal IMSW.

Oleh karena itu, Komisi XI DPR RI ingin mengetahui lebih lanjut terkait program yang akan dilaksanakan tersebut, serta output dan outcome yang diharapkan pad

program tersebut. Untuk menghemat waktu kami persilakan kepada Saudara Menteri Keuangan untuk memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI.

Kami persilakan saudara Menteri Keuangan.

MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak Pimpinan Komisi XI DPR RI dan para Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.

Ijinkan kami pada pagi hari ini akan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran dari Kementerian Keuangan dan pagu indikatif untuk tahun 2020. Di dalam presentasi kami, kami akan menyampaikan juga kinerja selama 5 tahun terakhir sehingga juga bisa memberikan semacam *compact and science* dimana kami berada dan apa yang masih perlu untuk dilaksanakan.

Kami akan menyampaikan 5 hal, pertama visi dan misi Kementerian Keuangan ini tentu hanya mereshuffle secara cepat, karena Komisi XI DPR RI tentu sudah mendapatkan presentasi ini selama 4 tahun terakhir. Kemudian bagian kedua adalah akuntabilitas dari kinerja Kementerian Keuangan untuk tahun 2015-2019 ini juga untuk memberikan konteks bagaimana progress atau kemajuan dari kinerja Kementerian Keuangan selama 5 tahun terakhir.

Kemudian kita akan menyampaikan bagian ketiga, rencana kerja Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2020. Dan tentu pada bagian keempat pagu indikatifnya di dalam rangka melaksanakan rencana kerja tersebut. Bagian akhir adalah kesimpulan.

Untuk bagian pertama, mengenai visi dan misi Kementerian Keuangan. Seperti yang telah kami sampaikan dalam beberapa tahun terakhir, visi dari Kementerian Keuangan adalah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan di abad 21. Ini artinya kita harus terus menggunakan instrument keuangan negara di dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut. Instrument keuangan negara adalah instrument policy, dia bukan tujuan, jadi dia adalah alat.

Misi kami adalah mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakkan hukum yang efektif. Yang kedua, menerapkan kebijakan fiskal yang responsive dan berkelanjutan. Ketiga, mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan resiko minimum. Itu artinya kita akan terus menggunakan neraca keuangan, tidak hanya sekedar bagian-bagian di dalam APBN tetapi keseluruhan neraca sebagai instrument secara inovatif namun tetap menjaga resiko agar tetap minimal dan manageable. Keempat, memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Artinya, setiap tahun kita akan terus menerus mencoba mengkaji dan memperbaiki belanja negara baik dari sisi perencanaan, alokasi dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangun. Dan terakhir mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber

daya manusia yang adaktif, sesuai kemajuan teknologi. Ini berhubungan dengan keinginan untuk membangun basis digital dan cortex di dalam penerimaan negara.

Kami ingin menyampaikan bagian kedua adalah kinerja Kementerian Keuangan sejak tahun 2015 sehingga 2019. Di dalam chart yang sangat sederhana untuk bisa memberikan gambaran bagaimana kinerja Kemenkeu. Kalau dilihat dari berbagai indikator yang memang masuk di dalam indikator kinerja Kemenkeu. Pertama, penerimaan perpajakan meningkat dari 1.240 triliun mencapai 1.518 triliun atau naik 278,5 triliun.

Custom clearance dari sisi hitungan hari menurun dari 1,2 hari menjadi hanya 0,57 hari pada tahun 2018. Indeks pemerataan keuangan antar daerah artinya semakin kecil semakin merata telah mengalami penurunan dari 0,72 menjadi 0,56 pada tahun 2018. Ini penurunan 0,16 dari tahun 2015. Nilai AKIP Kementerian Keuangan yaitu akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang dinilai oleh Kementerian PAN RB, kami terus mengalami peningkatan dari 82,93 sekarang mencapai 87,07. Dan dari sisi reformasi birokrasi yang juga dinilai oleh Kemenpan RB kami juga mengalami peningkatan dari 82,19 menjadi 85,68. Kami institusi yang selalu dinilai sebagai institusi yang baik atau bahkan terbaik di KL yang lain.

Dari kepuasan pengguna layanan kami juga mengukur dan terjadi kenaikan dari 4,06 menjadi 4,41 dalam 4 tahun terakhir. Dari sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara LKPP kita sudah mendapatkan WTP 3 tahun terakhir untuk LKP ABUN kita juga mengalami WTP dari semenjak tahun 2016 hingga 2018 dan untuk BA15, yaitu laporan keuangan untuk Kementerian Keuangan dan bahkan kami sudah WTP 4 tahun berturut-turut.

Capaian kami di dalam rangka membangun dan mendukung pembangunan dan prioritas nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden melalui Nawacita. Tahun 2016 kami mendukung Nawacita 1, 3, 6 dan 7. Yang satu adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman. Ini dalam bentuk kasus-kasus penindakan 405 atau naik 127%. Terbangunnya 7 pos lintas batas penindakan di wilayah perbatasan yang meningkat hingga 5 kali lipat atau 500%. Terselenggaranya program kerja sama selatan-selatan triangular, jadi kami dalam hal ini sudah sering dan bahkan diminta *technical assistance* oleh negara-negara berkembang lainnya. Dan terselenggaranya sidang tahunan *Islamic Development Bank* ke-41 dan *Work Islamic Economic Forum* ke-12. Untuk Nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa di dalam rangka untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terwujud melalui alokasi dana desa nasional dari yang tadinya hanya 46,9 meningkat lebih dari 100% hingga tahun terakhir. Alokasi bagi desa tertinggal juga ditingkatkan melalui reformulasi alokasi sehingga desa miskin yang tinggi mendapatkan 6,56 triliun atau meningkat sangat signifikan dari yang tadinya 2,9 triliun dari dana desa.

Yang Nawacita keenam, yaitu meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, maka kami mendukung fasilitas penyediaan air minum melalui program menuju 100% PDAM sehat terhadap 114 PDAM. Kita juga memberikan dukungan Pemerintah atas proyek KPBU untuk infrastruktur prioritas antara lain proyek SPAM unggulan, BLTU Batang dan proyek Palaparing. Juga pembangunan instrument kreatif financing seperti project base Sukuk terutama untuk membangun berbagai macam fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Dan untuk Nawacita ketujuh, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik terlihat dari beberapa indikator seperti local tax ratio, yang meningkat dari hanya 1,8 menjadi 2,09 atau naik 16%. Melalui berbagai perbaikan regulasi pajak daerah dan kapasitas SDM serta modernisasi pajak daerah. Kita juga melaksanakan tax amnesty dari kuartal III, IV 2016 dan deklarasi harta mencapai 4.296 serta diterbitkannya revisi aturan tax loan serta digitalisasi SPT dan implementasi e-SPT dan e-filing.

Untuk tahun 2017 Kementerian Keuangan mendukung 5 prioritas nasional, yaitu reform dibidang fiskal, kedaulatan energi, desa dan kawasan pedesaan, daerah perbatasan serta konsolidasi demokrasi dan efektifitas diplomasi. Di dalam masing-masing kami sampaikan di sini konsolidasi demokrasi adalah peran serta selatan-selatan maupun daerah untuk daerah perbatasan, DAK afirmasi ditingkatkan, DAK non fisik untuk tunjangan khusus guru di daerah tertinggal. Dalam hal ini dengan sasaran 41.599 guru dan reorganisasi untuk kantor bea cukai di daerah perbatasan seperti Merauke, Jagowibabang. Dan untuk mendukung pos lintas batas yang semakin terpadu.

Untuk kawasan desa dan pemerataan keuangan daerah kami terus memperbaiki indeks pemerataan yang terus turun dari 0,706 menjadi 0,59 melalui reformasi reformulasi DAU. Dan diseminasi dana desa kepada 4,585 desa. Di sini kami juga berterima kasih karena banyak Komisi XI DPR RI juga melakukan bersama-sama dalam rangka diseminasi dana desa.

Untuk tujuan kedaulatan energi kami mendorong dan mendukung pembangunan infra listrik dengan LKPBU dan aksesibilitas energi serta pengawasan arus keluar barang masuk khusus barang komoditas migas di daerah perbatasan. Di dalam rangka untuk menjaga keamanan kebutuhan migas dalam negeri. Dan terakhir untuk reformasi fiskal tahun 2017, kita menyetujui tax amnesty dengan jumlah deklarasi harta sejumlah 4,881 triliun dengan uang tebusan mencapai 134,8 trilion. Dan ini menghasilkan perluasan basis data kita.

Kita di tahun 2017 juga melakukan realokasi belanja konsumtif menjadi produktif, sehingga hasil akselerasi pembangunan jalan seperti jalan raya mencapai 12.325 KM, jembatan mencapai 8.686 meter, dan sambungan air minum mencapai 187.771 serta irigasi mencapai 5.455 KM. Kita juga melakukan peningkatan dana desa yang tadinya 60 triliun atau 800 juta per desa menjadi peningkatan 70 triliun, tahun 2017 adalah 60 triliun. Di mana desa berpenduduk miskin mendapatkan alokasi yang semakin tinggi.

Untuk tahun 2018 capaian kami yang cukup menonjol adalah dalam rangka kami mendukung program nasional di bidang kesehatan, dunia usaha, di bidang pariwisata, ketahanan energi, penanggulangan kemiskinan, pembangunan wilayah dan dibidang Polhukam.

Dari sisi kesehatan kami mendukung melalui PMK cukai hasil tembakau. Untuk bidang pengembangan pariwisata dan dunia usaha menggunakan PMK insentif fiskal untuk kawasan ekonomi khusus, regulasi bea masuk di tanggung Pemerintah dan PMK untuk fasilitas QT IKM.

Untuk ketahanan energy kami melakukan kajian dana ketahanan energi dan PMK untuk insentif pajak industry dalam negeri yang menggerakkan EBT. Untuk penanggulangan kemiskinan RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan pajak daerah serta retribusi daerah sudah kami siapkan. Dan pembangunan wilayah

kebijakan reformulasi dana desa kita semakin sempurnakan termasuk memberikand Diklat bagi peserta yang mengelola dana desa mencapai lebih dari 2.047. Untuk Polhukam kami menyempurnakan sistem SPAN, Sakti dan NPN kita dan regulasi fasilitas pajak bea cukai sektor jasa, ini yang dilakukan oleh BKF.

Dan tahun 2019 ini Kementerian Keuangan mendukung 3 prioritas nasional, yaitu pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja terutama melalui sektor pertanian, industry pariwisata dan jasa produktif, serta prioritas nasional kelima stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu.

Di dalam hal ini untuk yang pertama pengurangan kesenjangan kami melakukan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa ke lebih dari 1.426 peserta. Untuk nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja untuk sektor pertanian, industry pariwisata dan jasa produktif kami meningkatkan untuk layanan pembiayaan ultra mikro melalui PIP yang telah mencapai lebih dari 879 ribu usaha mikro. Dan penyusunan peraturan terkait kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional dengan satu draft RPP.

Di dalam rangka mendukung agenda demokrasi dan menjaga stabilitas maka kami melakukan implementasi sistem informasi keuangan terintegrasi di tingkat Satker lebih dari 1,152 Satker dan untuk hardware dan software dalam rangka peningkatan kapasitas layanan SPAN, Sakti dan NPN dengan pengadaan lisinse Sakti, dan sekarang tercapai 33%. Itu adalah kinerja kami di dalam rangka mendukung pembangunan dan prioritas nasional.

Kami tentu sebelum masuk ke Rencana Kerja di tahun 2020, seluruh pencapaian yang kami dapatkan dari tahun 2015 dengan indikator kinerja yang terus membaik. Tentu tidak terlepas dari dukungan Komisi XI DPR RI yang selama ini terus mendukung, baik dari sisi program kerja, penganggaran maupun di dalam dukungan-dukungan pelaksanaan program secara sinergis bahkan sering kami dilapangan bersama Komisi XI DPR RI.

Untuk tahun 2020, kami ingin mereshuffle kembali mengenai visi dan misi tersebut dan tujuan yang hendak dicapai dan apa project-project kegiatan strategis yang akan kami usulkan untuk tahun 2020. Visi dan misi adalah sama menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan di abad 21 dengan 5 misi yang tadi sudah saya sampaikan dan tidak ada perubahan, yaitu dari pendapatan negara, kebijakan fiskal yang responsive, menggunakan neraca keuangan secara inovatif, belanja negara yang semakin berkeadilan, efektif dan efisien, serta produktif dan mengembangkan proses bisnis berbasis digital dan sumber manusia yang adaptif.

Tujuan untuk tahun 2020 adalah:

1. Menjaga agar kebijakan fiskal kita tetap prudent, meskipun tetap responsive seperti yang ada di dalam misi yang kami sampaikan.
2. Melakukan penganggaran negara yang kredible. Untuk yang pertama sasaran strategisnya adalah kebijakan dan sektor keuangan yang berkualitas. Untuk penganggaran negara yang kredible sasaran strategisnya adalah perencanaan anggaran yang efektif, efisien dan akurat serta perencanaan TKDD yang efektif, transparan dan terintegrasi. Untuk hal ini kami meminta untuk DJA dan DJPK

untuk semakin sinergis sehingga belanja pusat dan daerah itu semakin bisa dilihat komplementaritasnya dan sinergis serta efisiensinya.

Yang ketiga tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan juga serta PNBPN yang optimal. Kami menggunakan kata optimal karena berbeda dengan maksimal, karena kita selalu menjaga iklim investasi, sehingga penerimaan negara harus tetap terjaga dari sisi trennya namun tidak boleh menyebabkan iklim investasi dan perekonomian menjadi tertekan, karena tujuan pembangunannya adalah pertumbuhan ekonomi yang produktif, kompetitif dan inklusif.

Kami akan terus memperbaiki dan menajamkan insentif perpajakan di dalam rangka untuk mendorong investasi dan ekspor. Belanja negara yang berkualitas, tujuan nomor 4 adalah bagaimana menggunakan anggaran lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Dan untuk daerah terutama kemampuan keuangan daerah yang akan semakin ditingkatkan dengan tata kelola yang lebih baik.

Untuk tujuan kelima yang berhubungan dengan pembiayaan, kami akan tetap menjaga dari sisi kehati-hatian prudent dan dari sisi resiko terutama dikaitkan dengan situasi global yang semakin tidak menentu. Nomor 6, untuk kekayaan negara kami juga akan terus mengelola kekayaan dengan lebih produktif dan optimal dengan menggunakan barang milik negara secara lebih efisien dan bagaimana investasi Pemerintah menjadi makin efektif dan produktif.

Untuk nomor 7, pengawasan lalu lintas barang ini adalah penegakan hukum ini terutama teman-teman bea dan cukai tapi sekarang juga sinergi dengan pajak. Dan bagaimana kita fokus menggunakan pelayanan bea dan cukai di dalam rangka pemberian fasilitas bagi kegiatan ekonomi secara efektif. Dan menciptakan lalu lintas barang yang efisien. Sedangkan yang kedelapan yang berhubungan dengan internal Kementerian Keuangan, yaitu birokrat kami akan terus membangun birokrasi dan SDM yang *fit for free brugge* yang ECAL dan memiliki kemampuan untuk adaptif terhadap teknologi digital.

Kegiatan strategis yang kami sampaikan untuk tahun 2020 adalah 12 project yang skala proyek nasional dengan nilai 509,8 miliar. Ini terutama di dalam rangka untuk mencapai sasaran RPJM dan kebijakan Presiden yang dituangkan di dalam RKP. Sedangkan untuk kegiatan strategis yang merupakan proyek unggulan ada 51 proyek senilai 319 miliar. Terdiri dari proyek yang sifatnya strategis dalam rangka mendukung tujuan Kementerian Keuangan dan mendukung tugas, fungsi, dari seluruh jajaran eselon I.

Untuk tahun 2020 sesuai dengan RKP 2020 yang bertemakan peningkatan SDM untuk pertumbuhan kualitas, maka dukungan Kementerian Keuangan dalam rangka untuk mencapai RKP di tahun 2020 terdiri dari 12 tadi yang disampaikan. Terdiri dari PN1 pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Itu terutama di DJPB dalam bentuk PIP untuk Umi dan layanan pembiayaan ultra mikro. Untuk infrastruktur dan pemerataan wilayah PN2 kami tidak masuk disitu. Untuk yang ketiga, adalah nilai tambah sektor riil industrialisasi dituangkan dalam bentuk BKF untuk kajian peningkatan produktifitas tenaga kerja dalam rangka menghindari *middle income trap*, pengkajian dampak kontribusi SJSN terhadap pendalaman pasar keuangan dan kolaborasi pusat daerah dalam implementasi strategi pembiayaan dan asuransi resiko bencana.

Dari sisi pajak pembaruan sistem cortex untuk PN3 masih ada dari DJPB, pelaksanaan Sakti secara nasional di seluruh Satker sesudah piloting selama 1,5 tahun terakhir. Pengadaan hardware dan software di dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan SPAN, Sakti dan NPN serta untuk DJPPR, mengembangkan pembiayaan proyek infrastruktur melalui penerbitan Sukuk nasional dengan skema investasi Pemerintah dan DJBJ. Intensifikasi pelayanan dan pengawasan kepastian terkait dengan berkembangnya e-commerce, transitment dan pengelolaan perbatasan.

Untuk prioritas nasional nomor 4, yaitu ketahanan pangan air, energi dan lingkungan hidup. BKF akan melakukan kajian untuk perpajakan dalam rangka mendorong kesinambungan energi dan harmonisasi kebijakan perpajakan pusat dan daerah.

Rencana tahun 2020 ini di masing-masing unit eselon I kami sampaikan. Untuk Sekjen pagu indikatif adalah 22,585 triliun di dalam rangka program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dari Kementerian Keuangan dengan *outcome*-nya tata kelola Kementerian Keuangan yang baik atau semakin baik. Dengan proyek unggulan kegiatan yang kami sampaikan di dalam tayangan di dalam layar.

Kemudian untuk Irjen, programnya adalah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Keuangan. *Outcome*-nya pengawasan intern yang memberikan nilai tambah. Jadi dalam hal ini banyak yang tujuannya adalah lebih mendukung daripada mereka menangkap orang yang tidak melakukan tugasnya atau menyalahi aturan tapi lebih mendukung. Anggarannya ada 107,52 miliar dengan proyek unggulan dan kegiatan dukungan Tusi seperti yang kami sampaikan di layar.

DJA adalah program pengelolaan anggaran negara dimana *outcome*-nya adalah pengelolaan APBN yang makin berkualitas dan PNBPN yang optimal sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN. Anggaran di DJA adalah 124,6 miliar dan kegiatan Tusi yang kami sampaikan di layar.

Untuk Dirjen Pajak program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak dengan *outcome* tercapainya penerimaan pajak yang optimal. Anggaran untuk pagu indikatif DJP adalah 7.943,23 miliar. Terdiri dari 1 proyek nasional yaitu Cortex dan 2 proyek unggulan serta kegiatan dukungan Tusi terutama dikaitkan dengan kegiatan untuk pendekatan *automatic exchange of information* dan perumusan kebijakan yang sekarang sedang makin diakselerasikan di bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, PPH, dan bea materai.

Untuk bea dan cukai programnya adalah pengawasan pelayanan dan penerimaan di bidang kepastian dan cukai. Tentu kita juga agar optimal dengan *outcome* meningkatkan kelancaran arus barang, melakukan fasilitasi yang tepat sasaran dan terjaganya penerimaan negara secara optimal serta pengawasan penggunaan jasa secara efektif. Pagu indikatif DJPJ adalah 3.638,2 miliar. Proyek nasionalnya adalah pelayanan dan pengawasan kepastian terkait dengan e-commerce, transitment, dan perbatasan. Untuk proyek unggulan dan kegiatan dukungan Tusi kami sampaikan di dalam layar.

Dirjen Perimbangan Keuangan, programnya adalah peningkatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah dengan *outcome* hubungan keuangan pusat daerah yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat. Pagu indikatif adalah 106,42 miliar dengan proyek unggulan dan kegiatan dukungan Tusi ada di dalam layar.

Sedangkan untuk Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko yang melakukan program pengelolaan pembiayaan dan resiko outcome-nya adalah mengoptimalkan pengelolaan pembiayaan resiko keuangan negara dan dukungan Pemerintah yang terjaga secara aman dan terkenal. Dengan pagu indikatif 113,42 miliar terdiri dari Rupiah Murni 86,3 miliar dan hutang luar negeri sebesar 27 miliar. Proyek nasionalnya adalah pembiayaan proyek infra melalui penerbitan SBSN dengan skema investasi Pemerintah. Sedangkan proyek unggulan dan kegiatan dukungan Tusi ada di dalam layar.

Dirjen Perbendaharaan yang melakukan pengelolaan perbendaharaan negara outcome-nya adalah meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan negara dengan proyek nasionalnya adalah pembiayaan UMI, penguatan proses bisnis untuk kelembagaan pembiayaan UMI dan pengadaan hardware, software dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan SPAN, Sakti dan NPN generasi II, serta implementasi Sakti untuk Satker seluruh Indonesia. Pagu indikatifnya mencapai 8.090,6 miliar ini termasuk BLU. Jadi supaya tidak dianggap bahwa Dirjen Perbendaharaan anggarannya lebih besar dari Dirjen Pajak. Karena disini adalah untuk BLU Kelapa Sawit dan BLU untuk PIP masuk di dalam Ditjen Perbendaharaan.

Sedangkan untuk DJKN program pengelolaan kekayaan negara dan penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dengan outcome terwujudnya pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang professional, tertib dan optimal dengan pagu indikatif 769,7 miliar. Ini juga nampaknya besar namun sebenarnya terdiri dari BLU Elman sebesar 68,4 miliar dan Rupiah Murni 701 miliar. Proyek unggulan dan kegiatan dukungan Tusi seperti yang kami sampaikan di dalam layar.

Terakhir untuk BPPK (Badan Pendidikan dan Pelatihan) dengan program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. dengan outcome SDM yang berkinerja baik, pagu indikatifnya mencapai 666,4 miliar terdiri dari Rupiah Murni 635 miliar dan BLU STAN mencapai 30,8 miliar.

Oh, tadi belum terakhir masih ada BKF, BKF program perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Dengan outcome terwujudnya kebijakan makro fiskal sektor keuangan dan pendapatan negara yang semakin berkualitas, serta kerja sama ekonomi internasional. Proyek nasionalnya di dalam rangka untuk peningkatan produktifitas tenaga kerja agar lepas dari *middle income trap*, ini kajian. Kemudian kajian dampak dan kontribusi SJSN terhadap pendalaman pasar keuangan. Kebijakan perpajakan dalam rangka mendorong kesinambungan energi, kajian harmonisasi kebijakan perpajakan pusat dan daerah. Dan kolaborasi pusat daerah dalam implementasi strategi pembiayaan asuransi resiko bencana. Proyek unggulan dan kegiatan dukungan Tusi seperti yang terdapat di dalam layar dengan jumlah anggaran 127,14 miliar.

Dan untuk lembaga *national single window* yang sekarang masuk di dalam BA15 ini adalah program mengintegrasikan layanan *Indonesia national single window* dengan *outcome* meningkatkan kelancaran arus barang ekspor-impor di dalam rangka mendukung sistem logistic nasional dengan anggaran 121,5 miliar yaitu targetnya membangun sistem INSW generasi II.

Itulah yang kami sampaikan sebagai pagu indikatif di dalam bagian keempat kami menyampaikannya secara satu table konsolidasi dari 10 unit. Kami sampaikan 35,648 triliun ini diluar BLU yang tadi kami sampaikan seperti sawit, Elman, LPDP, dan PIP. Ini adalah yang khusus merupakan Kementerian Keuangan untuk belanja operasional dan non operasional. Terdiri dari 12 unit eselon I dan dengan jumlah belanja operasionalnya 29,092 triliun. Belanja non operasionalnya 6,556 triliun dengan total keseluruhan belanja untuk pagu indikatif 2020 adalah 35,648,82 triliun.

Kami menyampaikan sumber dananya Rupiah Murni dan utang luar negeri mayoritas adalah semuanya Rupiah Murni. Jadi dari APBN kecuali ... **(rekaman terputus)** ... dimana ada elemen utang 27 miliar, sangat kecil. Oh, ini hubah bukan hutang. Hibah dari luar negeri sebesar 27 miliar, *sorry*.

Untuk belanja pagu indikatif yang kami masukkan BLU kalau seandainya BLU sawit dimasukkan Elman, LPDP dan PIP serta STAN, maka total jumlah menjadi 44.394 miliar. Ini terdiri dari belanja operasional 29,092 triliun dan belanja non operasional sebesar 15,302 triliun. Kalau berdasarkan sumber dana adalah kita bagi Rupiah Murni, BLU dan hibah luar negeri, tadi untuk BLU-nya adalah sebesar 8,745 triliun maka 35,62 plus 8,745 dan hibah 27 miliar totalnya adalah 44.

Kami ingin sampaikan perbandingan dengan pagu indikatif 2020 dengan perbandingan pagu 2019, maka kami sampaikan di dalam tabel ini serta kenaikan atau penurunan di masing-masing unit eselon I terdiri dari belanja operasional dan non operasional. Jumlah total belanja kenaikannya adalah 4,215 triliun ini tanpa BLU, terdiri dari anggaran operasional yang mengalami kenaikan 3,213 triliun dan non operasional sebesar 1 triliun.

Kenaikan belanja non BLU untuk operasional maupun non operasional adalah di unit-unit yang sebagai berikut. Sekjen kenaikan mungkin terbesar 2,14 triliun adalah untuk peningkatan *bandwidth* Pusintek dan mendukung reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan. Kenaikan pemeliharaan akibat ada tambahan aset serta adanya penambahan jumlah pegawai baru tahun 2019 sebesar 3,699 beserta kenaikan Tukin.

Untuk non operasional adalah belanja multiyear terutama untuk Gedung Keuangan Negara di Jayapura yang sampai sekarang masih dalam bentuk sewa. Dan untuk Mamuju serta renovasi Gedung Maramis yang merupakan warisan Deandels di Lapangan Banteng yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Pengadaan infra TIK dan untuk *disaster recovery* termasuk di dalam anggaran 129 miliar ini serta pengadaan perangkat *security management*.

DJB Pajak ada penambahan dari tahun lalu sebesar 1,095 triliun terutama untuk belanja sewa beberapa Satker untuk memenuhi belanja operasional kantor dan pemenuhan gaji tunjangan melekat dalam rangka rekrutmen pegawai baru dan sarana prasarana. Untuk belanja non operasional terutama untuk perubahan tarif provisi biaya cetak materai dan sarana prasarana perkantoran.

Bea Cukai anggaran menambah 672 miliar untuk menambah pemeliharaan Gedung Bangunan dan sarana prasarana serta gaji dan tunjangan melekat untuk rekrutmen pegawai baru. Dan pemeliharaan alat-alat pemindai dan peralatan mesin lainnya. Sedangkan untuk yang non operasional adalah patroli laut terpadu, intelijen, penindakan, penyidikan, dan pengawasan narkoba serta sarana dan prasarana pengawasan.

Perbendaharaan ada tambahan 175 miliar adalah untuk 4 KPPN Filial, penambahan operasi, dan pemeliharaan hardware SPAN, Sakti, dan NPN generasi kedua dan pemenuhan gaji tunjangan melekat, Untuk non operasional adalah untuk implementasi Sakti dan implementasi jabatan fungsional perbendaharaan di seluruh KL.

Untuk DJKN kenaikan 99,1 miliar untuk belanja operasional, yaitu belanja pemeliharaan dengan penambahan aset serta pemenuhan gaji tunjangan melekat. Serta untuk non operasionalnya adalah pengelolaan aset BUN dan sertifikasi aset. BPPK 20,8 miliar tambahan anggaran untuk operasional 22,6 yaitu pemeliharaan akibat adanya penambahan aset terutama Gedung BDK di Pekanbaru dan untuk meningkatkan *knowledge management*.

Pimpinan dan para Anggota.

Kami sampaikan pagu indikatif berdasarkan fungsi, program dan unit organisasi di dalam table selanjutnya. Mungkin kami tidak akan membacakan dan disini sudah termasuk BLU sehingga terdapat jumlah 44,39 triliun. Fungsi pelayanan umumnya 41,736 dan fungsi ekonominya 164,5 miliar dan fungsi pendidikan adalah 2,492 ini termasuk STAN dan LPDP.

Dengan demikian kesimpulannya Pimpinan dan para Anggota Dewan Komisi XI DPR RI yang kami hormati. Dari paparan kami pagu indikatif Kemenkeu tahun 2020 yang diusulkan sebesar Rp44.394.219.307.000,- adalah untuk menunjang kegiatan Kementerian Keuangan operasional dan non operasional termasuk BLU. Rupiah Murni 35,621 triliun dan BLU 8,745 triliun dan hibah luar negeri 27 miliar.

Mohon perkenan Pimpinan dan Anggota untuk menyetujui usulan pagu indikatif tersebut.

Demikian Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Baik, terima kasih Ibu Menteri.

Ibu dan Bapak sekalian Anggota Komisi XI DPR RI.

Kita mendalami terhadap penjelasan dari Menteri Keuangan.
Saya persilakan kepada Ibu Eva.

F-PDIP (Dra. EVA KUSUMA SUNDARI):

Terima kasih Pimpinan.

Ibu Menteri Keuangan beserta seluruh jajarannya.

Saya tidak membuat format pertanyaan tapi saya bentuk dalam usulan saja, karena yang kita terima adalah indikatif jadi kita tidak bisa dapat kira-kira programnya nanti seperti apa. Kenapa saya punya pertanyaan seperti itu, karena saya ingin bertanya tentang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan ketika saya melihat mengurus utamanya, misalkan ada gender, tata kelola, kemudian kerentanan terhadap bencana dan seterusnya.

Ini operasionalisasinya seperti apa, apakah ada tim yang ada di dalam Kemenkeu untuk memastikan bahwa RKAKL yang dari Kementerian-kementerian ini sudah mengintegrasikan pengarusutamaan ini. Pertanyaan ini menurut saya karena bisa saja menjadi komitmen moral tetapi saya berharap ini menjadi komitmen politik di dalam tahun anggaran yang akan datang. Contohnya misalkan sebetulnya apakah ada tim yang khusus untuk bertanya. Ini dampaknya bagi kesetaraan bagaimana atau ada dampaknya atau pakai data awal seperti apa untuk melihat gender gap atau misalkan karena kemarin saya di Baleg berdiskusi tentang rencana revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana, ternyata belum menjadi perspektif untuk yang sifatnya *mainstreaming*, jadi masih pada posisi yang isolative.

Jadi kalau kemudian ini menjadi komitmen pengaturutamaan saya ingin tahu atau usul saja agar supaya ada tim khusus yang memastikan memang dalam penyusunan RKAKL ini dioperasionalkan. Jadi nanti pada usai eksekusi anggaran kita sudah tahu ada yang sudah ditembak dan memang dampaknya memang seperti itu. Jadi saya ingin tahu apakah di Bappenas atau di Menteri Keuangan untuk memastikan RKAKL tersebut memang mengintegrasikan perspektif pengarusutamaan ini.

Itu saja Ibu, mohon maaf.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, berikutnya Bapak Johnny Plate.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Rekan-rekan Anggota yang terhormat, Ibu Menteri dan Wakil Menteri serta seluruh jajarannya.

Ada kenaikan sekitar 4 triliun dibandingkan tahun yang lalu kalau saya tidak salah disini. Dan itu lebih banyak ditempatnya Bapak Sekjen sekitar 2 triliun, khususnya untuk penambahan pegawai baru dan pusat informasi dan teknologi kalau tidak salah. Itu tekanannya itu disitu.

Nah, yang ingin saya tanyakan hampir sama dengan Ibu Eva sebetulnya. Ini dipaksa tanya jadinya mikir kita. Dalam kaitan dengan belanja, usulan belanja atau pagu ini dalam kaitannya dengan mendukung. Hari ini Ibu, saat ini barangkali masih sedang berlangsung eksepsi pasangan 01 di MK. Saya sambil jalan disini ini mendengar eksepsinya begitu kuat, sepertinya sulit terbantahkan itu eksepsinya. Asumsinya apa hubungannya dengan ini, hubungannya dengan ini adalah dukungan

pagu indikatif. Ini apabila Bapak Jokowi terpilih di mana tekanan programnya di pembangunan sumber daya manusia. Nah, dimana pagu indikatif di tahun pertama ini untuk mendukung, mensupport itu barangkali. Mainstream juga sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Eva.

Saya kira itu penambahan-penambahan disini sejauh itu penjelasannya cukup jelas disini. Apalagi mudah-mudahan bisa efisien digunakan, karena memang tingkat inflasi kita terkendali. Jadi dengan harapan penggunaan anggaran nanti menjadi lebih produktif dan efektif.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak Harry Poernomo.

F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan dan teman-teman sejawat Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,
Ibu Menteri beserta segenap jajaran Kementerian Keuangan yang saya hormati.**

Saya sebelumnya ingin menanyakan kepada Pimpinan, kira-kira mekanisme pembahasan ini untuk anggaran Kementerian ini apakah akan ada pendalaman lagi misalnya semacam konsinyering untuk membahas lebih dalam per Direktorat Jenderal atau cukup di sesi ini saja Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Inikan baru pembicaraan pendahuluan, jadi nanti pendalamannya pas sudah kita bahas sudah ada RAPBN dan nota keuangannya.

F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Baik, terima kasih.

Ibu Menteri, saya ingin untuk memudahkan karena memang tidak mudah pada kesempatan yang sangat singkat ini kita bisa membahas secara rinci semua aspek yang Ibu paparkan tadi. Oleh karena itu, saya ada pertanyaan saya sebenarnya sangat sederhana saja. saya ingin mendapatkan satu gambaran katakanlah kita gunakan istilah produktifitas atau efisiensi atau semacam. Intinya begini, saya ingin mendapatkan tolak ukur produktifitas atau efisiensi Kementerian Keuangan yang pada dasarnya dihitung berdasarkan belanja versus pendapatan yang dihasilkan untuk periode tertentu.

Anggaplah kita ada kenaikan 2020 ini kurang lebih 4 triliun tadi, apakah kenaikan ini juga diikuti oleh kenaikan pendapatan yang di-*collect* oleh Kementerian

Keuangan secara wajar. Saya tidak tahu perbandingan atau ratio apa itu tetapi intinya saya ingin mengukur atau memiliki tolak ukur kinerja Kementerian Keuangan secara kuantitatif.

Sulit buat kami khususnya buat saya dalam waktu yang sangat singkat ini memahami apa yang Ibu paparkan secara lebih pasti, kecuali kalau memang kita ada pembahasan yang lebih mendalam nanti seperti yang saya tanyakan kepada Pimpinan tadi.

Oleh karena itu, tolong Ibu sajikan kepada kami khususnya saya statistic paling tidak 5 tahun terakhir antara pengeluaran Kementerian Keuangan kita buat table saja yang pertama termasuk BLU, yang kedua non BLU karena BLU inikan agak berbeda kita bandingkan dengan pajak yang di-*collect* oleh Kementerian Keuangan. Saya anggap itu kinerja sepenuhnya Kementerian Keuangan.

Saya ingin mendapatkan rasionya, ratio ini apakah meningkat apa menurun 5 tahun terakhir ini. Jadi secara sederhana kita punya semacam tolak ukur, ukuran kinerja, karena kalau hanya membahas seperti ini saja sulit buat kami untuk mengukur sebetulnya program-program ini apakah memang dilaksanakan secara efisien, efektif atau tidak. Secara optimal atau tidak tadi Ibu menyinggung istilah optimal.

Jangan sampai katakanlah kenaikan yang 4 triliun ini ternyata tidak memberikan hasil yang sepadan dengan anggaran itu. Ini saja yang ingin kami tuju, oleh karena itu sebelum bisa menjawab ini tolong disajikan data statistik yang nanti dipaparkan di forum ini.

Itu saja dari saya, terima kasih Pimpinan, terima kasih Ibu Menteri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Sebelah kanan ada lagi?
Bapak Hatari mau tanya?
Silakan.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Ibu Menteri dan jajaran yang kami hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ini kita bicara anggaran harus teliti betul angka-angka, jangan langsung kemudian lihat *paper* berbicara. Saya meneliti satu per satu, jadi menurut saya, menurut Fraksi Nasdem realistis contoh platform tahun anggaran 2019 totalnya 46.252.810.452.000 tahun anggaran 2019. Tahun anggaran 2020 terjadi penurunan, jadi kalau dengan tambahan 4 triliun dari mana. Ini disini yang saya anggap realistis atau totalnya disini Rp44.394.219.307.000,- dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi

kekurangan kurang lebih 1.858.591.145.000 atau kurang dari 4,018%. Ini data Ibu, tolong dicek kembali. Saya melihat angka-angka pembandingnya setelah di-*break down* saya menemukan seperti begitu, tapi nanti dilihat lagi.

Kemudian Ibu Menteri, terkait dengan halaman 7 terutama di kawasan timur Indonesia ini kita keluar masuk desa-desa yang sekarang diistilahkan oleh Ibu Menteri Kesehatan 3T (teringgal, termiskin, terluar). Hampir seluruh masyarakat di desa ini Ibu, tidak mandi air tawar, mereka mengambil air minum dari kejauhan dari pulau-pulau terpencil pakai dirigen dan menjual lagi kepada masyarakat dengan harga yang mahal.

Jadi kalau musim kemarau panjang kita bisa bayangkan mereka dengan perahu sampan dalam kejauhan hanya mencari air bersih, sementara mandi setiap hari pakai air asin, air laut. Jadi jangan Pemerintah kemudian terus berteriak berwacana air minum, air bersih itu kondisi di sana. Saya yakin di Jawa tidak ada Ibu, untuk termiskin, terluar, dan tertinggal.

Satu lagi ini Ibu Menteri, secara gelondongan mungkin sangat spektakuler, barangkali nanti karena ini masih pagu indikatif yang sudah bisa disusun RKA dengan harapan nanti ada perbaikan-perbaikan tentu tidak bisa ada ketambahan lagi dengan pagu indikatif terkait dengan halaman 12. Rencana penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2020 dengan beberapa kegiatan lagi atau kurang lebih 12 proyek ini tidak dirinci dengan dananya hampir setengah triliun menurut Fraksi kami sangat spektakuler. Tapi nanti kalau Kementerian Keuangan mem-*break down* ini secara jelas pasti kami ada gambaran, tapi kalau gelondongan sebesar 9,84 triliun bagi Fraksi kami sangat spektakuler.

Termasuk proyek unggulan dengan 51 proyek menelan biaya kurang lebih hampir 420 atau 319 triliun, cukup besar. Tolong ini di-*break down* agar Komisi XI DPR RI mendapatkan pemahaman tiap-tiap *item* dengan komponennya. Program, kegiatan-kegiatan ini dengan masing-masing alokasi biayanya. Dengan demikian pasti kami akan memahami dan bisa mengukur koefisiennya dari masing-masing kegiatan itu.

Yang terakhir dari saya Ibu dalam kapasitas Ibu Menteri sebagai bendahara umum negara. setelah 12 tahun kita mendapat predikat yang begitu terhormat dari BPK atau Wajar Tanpa Pengecualian. Saya ingat betul WTP tetapi di dalamnya ada 8 kementerian/lembaga yang kacau balau, termasuk KKP. Itu yang saya mengatakan kalau tenggelam kapal paling jago tidak ada di dunia itu, hanya Ibu Menteri ini, tetapi tata kelolanya kan kacau balau. Pertanyaan kami adalah 8 kementerian/lembaga yang tata kelolanya kacau balau itu Ibu sebagai bendahara negara sudah mem-*protect* bagaimana tindaklanjutnya, mana sangat material.

Kemarin kita menerima predikat WTP tetapi kementerian/lembaga yang tata kelolanya kurang bagus sudah berkurang atau kurang lebih tinggal 2 kementerian/lembaga dan itu pasti Ibu, sangat material. Karena itu, menurut kami tolong Ibu sebagai bendahara negara perlu melakukan *protect*. Apa di administrasi atau terjadi kesalahan posting dan lain-lain.

Terima kasih Pimpinan dari saya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Ibu Nurhayati.

F-PD (Dr. Hj. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirahim.

**Ibu Menteri beserta seluruh jajarannya,
Pimpinan beserta Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ibu Menteri, terima kasih paparannya saya hanya ingin memberikan masukan beberapa hal antara lain mengenai capaian prioritas nasional Kemenkeu yang dipaparkan dengan bagus. Untuk yang PN1, PN3, peningkatan nilai tumbuh ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian industry, pariwisata dan jasa produktif lainnya.

Saya ingin menyampaikan saja kita pertanian dan sebagainya itu saya tahu Ibu punya banyak pengalaman diluar apalagi ketika Ibu menjabat di IMF. Bahwa kenyataan itu Ibu, pertanian itu dimana-mana masih disubsidi. Di negara Amerika, Eropa, itu pertanian di Jepang semua masih disubsidi. Bahkan subsidiya besar sekali, karena memang ini sangat penting karena ketahanan pangan kita itu berarti stabilitas politik. Yang ingin saya tekankan kenapa di kita selalu subsidi pertanian dan lain sebagainya itu mereka selalu mengeluhkan bahwa meskipun ada subsidi pupuk, tapi pupuknya tidak ada, tidak tahu kemana. Nah, ini saya ingin Ibu tadi mengatakan bahwa peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan dukungan.

Nah, beberapa hal yang saya ingin juga kenapa kita tidak selalu mengukur Ibu misalnya tadi Ibu memberikan program UMI itu bagus, tetapi UMI itu kita tidak ukur berapa banyak. Kita hanya mengukur apakah uangnya sudah tersalurkan akan tetapi apakah ini benar-benar meningkatkan atau mampu mensejahterakan ini yang kita belum punya ukurannya. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, mengenai RKP-nya kan bagus. Nah, kemarin waktu World Bank di Bali itukan kita semua dimana-mana selalu bertemakan sustainable development. Sebetulnya itukan tujuan pembangunan berkelanjutan, inikan tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Daripada misalnya ini hanya kesetaraan gender dan lain sebagainya di 17 goal inikan memang semuanya termasuk untuk keamanan dan lain sebagainya.

Saya dari tadi mencoba mencari tetapi saya belum lihat, sementara sudah lihat di BPK itu ketika melihat kinerja itu ada dihubungkan dengan tujuan pembangunan bagaimana pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi saya berharap dari Kementerian Keuangan juga akan mencantumkan di RKP-nya, yaitu bagaimana apakah ini menuju ke tujuan pembangunan berkelanjutan itu karena ini semuanya

adalah bermuara kepada kesejahteraan rakyat, stabilitas politik, keamanan dan *claimed change* juga Bu.

Itu saja dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Masih ada?

Bapak Andreas silakan.

F-P. PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati,
Menteri Keuangan beserta jajarannya.**

Jadi ini kita yang pertama menerima RKP dari Kementerian Keuangan. Dan kalau kita lihat tadi paparannya kan pagu indikatif ini yang menentukan justru Kementerian Keuangan dan Bappenas. Karena itu saya ingin lihat sebetulnya supaya mendapatkan gambaran helicopter view-nya kalau orang bilang, karena secara keseluruhan itu berapa sih dari Kementerian/Lembaga yang mengajukan pagu. Dan kemudian setelah dievaluasi oleh Kementerian Keuangan maupun Bappenas, berapa Kementerian/Lembaga yang naik dan turun. Sehingga kita dapat melihat secara keseluruhan, karena ini baru pertama kali kita bahas kementerian lain, baru nanti siang kita dengan Bappenas dan seterusnya.

Tanpa ada gambaran dari helicopter view ini saya belum bisa memberikan tanggapan sebetulnya, karena kita harus tahu secara keseluruhan, keseimbangan terutama bagaimana dukungan utama terhadap tema pengembangan sumber manusia itu *break down*-nya yang berkualitas. Jadi apakah misalnya untuk mengembangkan inovasi itu misalnya penterjemahnya bagaimana, apakah Kementerian Riset dan Teknologi itu naik misalnya atau dalam bentuk wujud apa, sehingga dengan demikian ada alur antara tema yang akan dicapai di tahun 2020 itu dengan alokasi anggarannya. Apakah ini ada *link*-nya atau tidak, ini yang kita ingin dapatkan gambaran, karena ini kita harus hati-hati. Mitra kami adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas, tetapi juga menentukan secara keseluruhan, karena itu kita dalam hal ini harus hati-hati. Kami sangat mendukung mitra kami tetapi kami juga harus melihat bagaimana keseimbangan dengan kementerian yang lain. Karena ini baru pertama RKP-nya, saya tidak tahu nanti yang Bappenas, yang lainnya, BPS itu bagaimana, karena disini juga tidak disampaikan awalnya berapa sih pagu indikatifnya. Kemudian dilakukan review oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan jadi berapa, disini langsung kepada angka yang sudah menjaid pagu indikatif hasil review.

Saya kira demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, masih ada lagi?
Silakan.

F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):

Terima kasih.

Ibu Menteri dan jajaran Kementerian Keuangan yang saya hormati.

Kalau saya lihat perbandingan pagu 2019, pagu indikatif 2020 ada kenaikan 4,2 triliun atau hampir sekitar 14%. Tentu kalau dikaitkan dengan orientasi Pemerintah untuk penguatan sumber daya manusia ini berarti Kementerian Keuangan adalah bagian penting dari usaha untuk mengejar penguatan sumber daya manusia. Yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira hal penting apa di Kementerian Keuangan atau capaian-capaian apa yang mau diorientasikan oleh Kementerian Keuangan dalam penguatan sumber daya manusia dibandingkan, saya mengutip Bapak Andreas tadi dibandingkan dengan kementerian atau bidang-bidang yang lain, lembaga-lembaga Pemerintah yang lain.

Saya dengar ada juga lembaga Pemerintah yang lain yang mendapatkan pemotongan anggaran di pagu indikatif. Itu artinya, kalau ada yang naik itu berarti ada yang dikejar di kementerian tersebut, kalau ada lembaga yang lain yang dipotong itu berarti ada disinsentif. Jangan-jangan malah ada asumsi ini berarti kalau lembaga yang dipotong itu berarti ada orientasi disinsentif terhadap penguatan sumber daya manusia. Jadi jangan ada persepsi seperti itu, karena itu saya ingin tekankan atau tanyakan kira-kira apa yang ingin dikuatkan di Kementerian Keuangan sendiri dalam rangka pencapaian penguatan sumber daya manusia secara umum yang diorientasikan oleh Pemerintah.

Itu saja Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak Refrizal tidak mau?
Baik.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Saya terakhir Ibu Menteri Keuangan, saya hanya mau tahu di Departemen Keuangan itu apakah ada sebuah tim yang mempelajari dan menganalisa tentang anggaran-anggaran tersebut. Tadi teman-teman menyampaikan ada yang naik, ada yang dipotong. Nah, kita mau tahu itu siapa yang memotong itu, apakah menteri-menterinya sendiri yang memotong atau ada tim yang memotong. Kita mau tahu dasarnya apa memotong-motong itu, perlu penjelasan itu.

Karena ada satu lembaga yang jumlah sumber dayanya bertambah tapi anggarannya dipotong. Jangan sampai ada lembaga yang jumlah sumber dayanya berkurang akan tetapi anggarannya dinaikan. Nah, ini perlu jelas semuanya. Jadi

jangan sampai ada faktor-faktor yang tidak *accountable* untuk bisa mengatakan bahwa ini harus dipotong dan ini harus ditambahkan. Ini perlu dijelaskan kepada kita, supaya parameter dalam pengambilan keputusan sebuah anggaran itu sama. Dan tentunya yang dilihat adalah kinerjanya. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini masalah pajak, kan tadi anggarannya pajak disebutkan naik. Saya mau tahu sekarang kan ekonomi inikan sudah berubah dari konvensional menjadi digital, kesiapan perpajakan kita bagaimana. Dalam beberapa tahun terakhir ini penerimaan pajak dari digital ini berapa dibandingkan dengan yang konvensional. Apakah Departemen Keuangan sudah mempersiapkan suatu desain yang untuk peluang ini, karena kita tidak mungkin masa bodoh terhadap digitalisasi ini. Demikian juga dengan Bea Cukai, karena sekarang kan semakin canggih. Tentunya digitalisasi juga ini diperlukan.

Kemarin kita lihat di televisi ada yang masukin lagi limbah plastik, di Batam sama di Surabaya kalau tidak salah. Nah, ini harus diungkap tuntas ini Bapak Dirjen model-model begini. Dan perangkat apa yang bisa membuat orang tidak bisa lagi berbuat demikian. Ini perlu supaya penganggarannya pun jelas dan output yang ingin dicapai itu bisa kelihatan.

Saya rasa ini dari saya, saya persilakan kepada Ibu Menteri Keuangan untuk memberikan penjelasan dari pertanyaan dari para Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI.

Silakan Ibu Menteri.

MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI):

Pimpinan dan para Anggota Komisi XI DPR RI.

Terima kasih atas pertanyaan dan tentu juga berbagai arahan dan pemikiran bagaimana kita mendesain RAPBN 2020 secara lebih baik dan konsisten dengan program pembangunan.

Pertama, dari Ibu Eva tadi dan juga mungkin Ibu Nurhayati agak mirip mengenai bagaimana *mainstreaming* itu dilaksanakan. Kalau Ibu Nurhayati khusus supaya SDGs dimasukkan dalam *mainstreaming* ini. Kalau khusus untuk BA15 karena yang sekarang ini kita bahas disini adalah bagian anggaran 15 dari Kemenkeu saja dari keseluruhan anggaran seluruh negara.

Untuk BA15 di dalam pengarus utamaan ini memang dilakukan semacam *tax force* yang dilakukan oleh baik di Sekjen maupun di Dirjen Anggaran. Kalau untuk KL yang lain tentu di Dirjen Anggaran karena mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan monitoring, pelaksanaan dan mengevaluasi perencanaan penganggaran di Kementerian/Lembaga. Jadi seperti pengarus utamaan gender di Kementerian Keuangan memiliki tim untuk melakukan pengarus utamaan gender yang ada di dalam Rocankeu Biro Perencanaan Keuangan di bawah Sekjen untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan anggaran kita melaksanakan pengarus utamaan gender. Untuk KL yang lain itu dilakukan di tempatnya Dirjen Anggaran. Demikian juga untuk pengarus utamaan yang lain.

Dan untuk gender Kementerian Keuangan sudah cukup *advance* sehingga kami bahkan menjadi mentor bagi KL yang lain yang ingin melakukan pengarus utamaan gender. Ibu Nurhayati tadi menyampaikan agar SDGs di-*mainstream* kan

kita tentu sebetulnya secara implisit sudah di semua Kementerian/Lembaga karena SDGs sudah diformalkan dalam bentuk Peraturan Presiden yang akan menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga untuk menjalankan program-programnya.

Untuk pertanyaan Bapak Johnny Plate dan juga tadi disampaikan juga oleh yang lain seperti Bapak Andreas bagaimana keseluruhan APBN mendukung program dari pemenang Pemilu 2019 ini. Jadi di dalam Sidang Kabinet memang kami terus atau bahkan persiapan ini kami terus memonitor program-program yang disampaikan oleh pasangan calon, sehingga kami juga melakukan pengestimasi bagaimana nanti mengkuantifir dari implikasi program-program yang disampaikan. Dengan hasil yang meskipun masih akan menunggu dari Mahkamah Konstitusi, kami telah mengkuantifisir berbagai program yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. Jadi program seperti kartu-kartu dari mulai Kartu Pra Kerja, Kartu Sembako, kartu untuk kesehatan tetap diperhatikan.

Kita sudah memasukkan di dalam program ini dan sudah dilakukan sidang kabinet untuk mengalokasikan dan kita *secure*. Ada beberapa mungkin dikaitkan dengan proses yang tadi disampaikan oleh Bapak Melchias maupun yang lain, maupun Bapak Andreas. Pertama, di dalam rapat sidan kabinet biasanya kami menyampaikan dulu amplop besarnya, masih dalam bentuk prosentase terhadap GDP tapi kira-kira ada indikasinya kalau seandainya GDP sekian, maka jumlah amplop besar dari belanja negara tahun depan kira-kira sekian dengan defisit maupun penerimaan negara yang sudah estimasi sehingga kita memiliki uang yang akan dibelanjakan sekian.

Dari uang belanja yang sekian ini sudah harus dikeluarkan yang sifatnya mandatoris spending. Dikeluarkan juga untuk personel yang berkaitan dengan jumlah pegawai dan berbagai kenaikan Tunjangan berdasarkan peraturan-peraturan keputusan umpamanya beberapa KL naik Tunjangan karena adanya perbaikan dari sisi reformasi birokrasi. Dan itu semua sudah kami lakukan, sehingga kemudian keluarlah yang disebut belanja untuk belanja modal dan belanja barang dan belanja sosial. Belanja sosial kami menampung hampir semua program prioritasnya Presiden Jokowi yang sudah disampaikan di dalam berbagai kampanye, sehingga itu dimasukkan terutama ada di belanja sosial.

Kemudian untuk belanja barang, khusus untuk belanja barang ini Presiden dan Wapres meminta kami kembali ke *base line* 2015. Jadi di *base line* 2015 itu kami kembalikan lagi hampir seluruh Kementerian/Lembaga itu dipotong sebetulnya untuk belanja barangnya, karena kalau belanja pegawai tidak mungkin kami kembalikan lagi ke 2015 dengan Tunjangan-tunjangan yang mereka sudah terima dan kenaikan.

Dan disitulah yang kemudian menimbulkan fiskal space yang kemudian dialokasikan untuk program-program prioritas yang tadi telah disampaikan. Itu tentu dilakukan di dalam di satu sisi Bappenas dengan RKP-nya dan oleh karena itu kemudian ada kriteria untuk mengalokasikan kalau ada fiskal space dengan adanya pemotongan plus tambahan belanja tahun depan. Dan di sisi lain tentu kita lihat dari RKAKL dari masing-masing Kementerian/Lembaga.

Kami kemudian memberikan *assignment* yang disebut pagu indikatif yang mungkin tadi disampaikan ada yang mengalami kekurangan atau dipotong dan ada yang meningkat yang mungkin tidak terefleksikan keseluruhan karena kalau dari sisi belanja barang saja mungkin banyak beberapa KL kami akan coba memisahkan mereka yang memang mature atau ciri dari pekerjaannya memang lebih banyak

belanja operasional, seperti Kejaksaan, Kepolisian, BPKP, itu semuanya memang dia adalah belanja operasional atau belanja barangnya karena memang mereka pekerjaannya adalah melakukan. Tidak seperti Kementerian PU yang harus melakukan bangunan, belanja modal.

Dengan melihat hal itu kemudian kita melakukan kalibrasi mengenai pagu indikatif. Karena ini masih pagu indikatif tentu sesuai dengan pembahasan DPR RI dan di dalam sidang kabinet sendiri, kami akan terus melakukan penyempurnaan mengenai pertama sebetulnya berapa estimasi penerimaan negara yang lebih akurat. Nanti dari *range* menjadi *one point* di dalam nota keuangan.

Dan kemudian mengerucut kepada berapa sebetulnya defisit yang akan terjadi apabila sisi belanjanya sudah ditetapkan di dalam sidang kabinet mengenai berapa-berapa alokasinya. Dan kemudian kita lihat berapa postur APBN yang lebih spesifik. Ini nanti akan ada di dalam nota keuangan. Jadi memang sekarang ini ada reaksi mengenai beberapa Kementerian/Lembaga yang kebetulan mengalami penurunan.

Bagi Kementerian Keuangan sebetulnya kenaikan 16% itu tidak merefleksikan terus karena ternyata sesudah kami juga pelajari untuk tahun 2019 ini beberapa pengeluaran kita memang tidak masuk di dalam BA15. Karena waktu itu kita belum merencanakan seperti kenaikan Tunkin, sehingga mungkin *baseline*-nya berbeda. Ini yang kami sebutkan tadi kenaikan mungkin tidak naik. Kalau hanya *apple to apple* mungkin tidak naiknya 16%, itu yang ingin kami sampaikan supaya kemudian juga ada proporsional.

Kenapa Kementerian Keuangan naik, apakah ini sesuai dan konsisten dengan prioritas nasional. Pertama, terutama untuk menampung kebutuhan pegawai di 2 instansi yang sangat penting, yaitu Pajak dan Bea Cukai, karena merekalah sebetulnya yang *men-generate* penerimaan negara. Sebetulnya untuk yang lain saya sudah mencoba untuk mengendalikan semaksimal mungkin supaya terjadi lebih banyak efisiensi. Dan oleh karena itu, kita akan tetap mengevaluasi karena hari ini adalah pagu indikatif Pimpinan. Kami sebenarnya belum selesai betul, karena kami bahkan tadi pagi masih menginstruksikan berapa jumlah rekrutment untuk tahun depan untuk berapa unit-unit yang kita lakukan.

Kemudian ini jumlahnya ya Pak, dari 3.699 52,6% adalah pajak. 22,5% adalah Bea Cukai dan 18% di Perbendaharaan. Kami masih akan mengevaluasi terutama untuk perbendaharaan yang harusnya sudah melakukan mekanisasi, elektronifikasi, dari sisi pembayaran harusnya kenaikannya tidak perlu harus sebesar-besarnya. Nanti kita lihat lagi, jadi kami memang ini masih pagu indikatif kemungkinan kita akan bisa evaluasi terhadap kebutuhan jumlah tenaga kerja.

Nah, untuk Pajak dan Bea Cukai inipun saya tetap meminta kepada dua Dirjen melihat apakah betul kebutuhan komposisinya. Ini agar kita juga bisa memiliki nanti di dalam pagu yang lebih final di nota keuangan mungkin bisa lebih kecil dari 34 triliun. Ini adalah yang kami sampaikan.

Namun, karena keinginan dan kebutuhan untuk menaikkan penerimaan negara dan tadi pertanyaan Bapak Harry Poernomo mengenai produktifitas per pegawai. Kalau kita lihat seperti per pegawai dari penerimaan pajak itu dari tahun 2015 27,9 miliar per pegawai naik menjadi 34,34 miliar di tahun 2019. Tentu kalau kita catatannya mereka tercapai sesuai dengan targetnya. Namun, artinya kenaikan dari 27,9 mencapai tahun lalu 28,9 jadi naik sekitar 1 miliar untuk per kepala di Direktorat Jenderal Pajak. Kalau ditambahkan *extra effort* itu berarti di atas *baseline* kenaikannya

naik lagi 5,8 miliar tahun 2015 ke 6,3 miliar. Artinya, total kombinasi terjadi kenaikan hampir 2 miliar per kepala.

Untuk Bea dan Cukai kalau dilihat per pegawai dilihat hanya dari penerimaan saja, karena Bea Cukai sebetulnya tidak hanya penerimaan. Kalau kita lihat kinerjanya dari sisi penangkapan penyelundupan terutama narkoba dan yang lain-lain kami tidak melakukan kuantifikasi. Namun, kalau hanya dari jumlah pegawai per penerimaan mereka maka per kepala adalah 12,8 miliar naik menjadi 13,6 dan 13,2 dan di 2019 turun sedikit 12,37. Ini adalah yang kita lihat, kalau dilihat dari *cost*-nya sebenarnya *cost* per pegawai lebih menurun. *Extra effort*-nya antara 0,4 miliar atau 420 juta sampai 350 juta per kepala. Mungkin itu yang tadi untuk membantu yang disampaikan oleh Bapak Harry dari beberapa indikator. Kami mencoba untuk terus merasionalkan berapa jumlah SDM dan biaya per SDM-nya dibandingkan berapa tanggungjawab kerja dan kinerja, meskipun sebagian bisa dikuantifisir karena kita berhubungan dengan Keuangan Negara. Namun, sebagian juga dari sisi *law enforcement* tau *enforcement* dari sisi perbaikan tata kelola mungkin tidak terlihat dari sisi indikator seperti itu. Namun kita akan tetap menggunakan indikator yang bisa dikuantifisir.

Untuk Bapak Hatari tadi yang penurunan itu mungkin sebagian besar dijelaskan oleh penurunan dari BLU sawit. Kami tentu dari sisi tadi berbagai prioritas seperti pengadaan air bersih di semua provinsi dan wilayah kita tetap akan mendorong sesuai dengan prioritas dari Kementerian/Lembaga terutama PUPR.

Untuk WTP tadi yang 8 WTP yang belum WTP, kita terus bekerja sama dengan KL tersebut untuk tahun 2018 kemarin 82 KL dan LKBUN WTP dan 4 yang WDP, itu hanya satu yang disclaimer, yang disclaimer adalah Bakamla. Yang tadi disampaikan oleh Bapak Hatari Kementerian Perikanan sudah mendapatkan WTP. Kemudian dan untuk yang masing-masing dulu 8 inipun yang sebelumnya 2017 kami terus bekerja sama Kementerian tersebut dan BPK, sehingga mereka semakin hari semakin meningkat. Itu sesuai dengan tanggungjawab kita sebagai BUN seperti yang disampaikan Bapak Hatari tadi.

Untuk Ibu Nurhayati mengenai mekanisme subsidi, kita akan terus bekerja sama dengan KL di dalam rangka untuk memperbaiki mekanismenya, sehingga jumlah dan target serta kemungkinan terjadinya kebocoran bisa diminimalkan. Jadi untuk subsidi energi berarti kami bekerja sama dengan Kementerian ESDM seperti elpiji 3 kg, subsidi solar dan subsidi premium. Untuk pupuk dan waktu itu ada benih atau bahkan hibah alsintan itu kami bekerja sama untuk meminta pada Kementerian Pertanian agar targetnya maupun dari sisi mekanisme penyampaiannya bisa lebih baik.

Kemudian tadi yang disampaikan Bapak Andreas, Bapak Johnny Plate mengenai programnya Presiden terpilih. Kami sudah sampaikan untuk Bapak Sarmuji tadi pertanyaannya kenaikan dan penurunan. Kami tentu dari sisi pagu indikatif ini untuk mendapatkan *feedback* dari masing-masing Komisi yang menjadi partner Pemerintah. Tentu kami juga melihat mengikuti pembahasan masing-masing KL dengan Komisi semuanya menginginkan kenaikan. Tapi tentu dari sisi total anggaran nanti ada batasnya dan dari pembahasan masing-masing KL dengan Komisi masing-masing nanti akan dibawa ke sidang kabinet sebelum kita memfinalkan nota keuangan. Dan disitu akan kelihatan dalam sidang kabinet berapa KL naik dan berapa KL turun dan berapa jumlah pagu anggaran itu ditetapkan dalam sidang kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Bapak Presiden sendiri.

Bapak Melchias tadi menanyakan tim yang melaksanakan ini. Kalau masing-masing diproses DJA dan Bappenas memang ini yang mengikuti seluruh KL. Namun, memang biasanya waktu pagu indikatif kelihatan dan saya tahu bahwa terutama DPR RI merasa shock karena kemarin pagu indikatifnya turun sangat banyak. Tentu ini kemudian akan menimbulkan reaksi. Kita akan melihat berapa sebetulnya kebutuhan masing-masing sampai hari inipun kita akan tetap berhubungan dengan seluruh KL. Berapa yang memang betul-betul kegiatan yang prioritas dan harus dianggarkan. Namun, juga kami tetap harus memperhatikan arahan Presiden supaya kembali ke *baseline* 2015. Jadi ini dua hal yang terus kita sebagai bersama-sama dengan Bappenas mencoba untuk menjalankan arahan dari Presiden yang mengarahkan agar belanja barang harus dikelola secara ketat, bahkan beliau secara sangat spesifik meminta kembali kepada *baseline* 2015. Realisasi karena banyak yang waktu itu diberikan anggaran cukup tinggi dan kemudian realisasinya tidak tercapai.

Dan di sisi lain kami tetap mengakomodasi program prioritas dan hal-hal yang memang tidak bisa dihindarkan dan memang sudah merupakan program kerja. Jadi nanti hasilnya akan merupakan kombinasi dua itu di dalam nota keuangan.

Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk masing-masing mungkin dari Dirjen bisa menjelaskan beberapa pertanyaan tambahan seperti tadi pajak digital, kemudian mungkin nanti Bapak Dirjen Anggaran, Bea Cukai kalau bisa menambahkan dan dari Bapak Sekjen kalau ada tambahan atau Bapak Wamen.

Silakan.

WAKIL MENTERI KEUANGAN:

Terima kasih Ibu Menteri.

Pimpinan, Bapak Melchias tadi menanyakan terkait upaya kami di dalam kesiapan menghadapi digitalisasi khususnya Kementerian Keuangan secara menyeluruh. Berbagai *approach* yang dikerjakan oleh Kementerian Keuangan menghadapi digitalisasi ekonomi ini, ini memang meng-*create* sesuatu yang perlu dipersiapkan dengan matang.

Pertama, dari segi persiapan digitalisasi itu ada yang lintas negara *cross border*, tetapi ada juga yang murni di domestik, yang di domestik lebih mudah di-*approach* sementara yang lintas negara itu lebih sulit. Kementerian Keuangan pertama untuk level persiapan perencanaan, sangat terlibat dengan berbagai institusi untuk bagaimana menghadapi perkembangan digital ekonomi.

Ibu Menteri di G20 selalu mengikutkan BKF dan DJP untuk mengikuti perkembangan khususnya menghadapi digitalisasi ekonomi yang lintas negara, supaya kita juga seragam penerapannya. Untuk yang di Direktorat Jenderal juga kami sangat aktif Direktorat Jenderal Pajak dan BKF berkomunikasi dan juga berdiskusi dengan OECD juga sangat kami lakukan untuk menghadapi bagaimana mempersiapkan untuk mengawasi perpajakan digitalisasi. Untuk yang termasuk dengan Australia, Singapura, dan di Asian kami juga sangat aktif. Pendekatan bahwa kita extra hati-hati kami lakukan dengan baik di Kementerian Keuangan.

Yang kedua, kita beruntung secara hukum sebenarnya digitalisasi ini dari segi perpajakan terutang pajak sepanjang ada objeknya karena di ketentuan dan Undang-Undang tidak ada yang mengatakan non digital yang terutang yang digital tidak, karena yang difokuskan di ketentuannya sepanjang ada objek pajak kalau ada

penghasilan melampaui batas ya bayar pajak. Kalau ada omset di atas 4,8 miliar dia tidak UMKM, kalau ada omset diatas 4,8 miliar menjual barang kena pajak apakah digital atau non digital menjadi pengusaha kena pajak. Jadi secara aturan sebenarnya kita punya dasar yang kuat yang menjadi tantangan.

Yang kedua adalah bagaimana *me-manage* pengawasan supaya itu bisa terhandle dengan baik. Oleh karenanya ada dua lagi yang kam kerjakan juga, pertama penyiapan IT supaya kita bisa menyiapkan atau memonitor dengan bagus aktifitas digital ekonomi itu dengan costex dan juga perbaikan-perbaikan teknologi informasi DJP akan tercapai. Yang kedua, yang sangat penting adalah mengelola data base khususnya data perpajakan untuk mengawasi kepatuhan perpajakan. Itu juga menjadi sangat penting karena digital ekonomi ujung-ujungnya juga akan berakhir juga dengan ada data, ada data keuangan, ada data perbankan, ada data transaksi. Untuk itu, pengelolaan data di Direktorat Jenderal Pajak juga terus kami kembangkan. Kami bangun CRN, kami bangun tata kelola data base yang lebih handal sehingga setiap ada data yang masuk ada prosedur yang sangat bagus bagaimana meng-handlenya dari mulai masuk di cleansing, diversifikasi, di-matching itu secara baku, itu secara otomatis, sehingga digital inipun harusnya bisa bertangkap.

Jadi itu yang kami lakukan dan on top itu diatasnya ada tax force khusus juga di DJP yang menyiapkan mengenai digitalisasi ekonomi. Jad 4 hal itu yang kami lakukan, mudah-mudahan ini akan bergulir secara dinamis kami bisa menyiapkan diri untuk menghadapinya.

Demikian Pimpinan.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Pimpinan, sebentar.

Baik, terima kasih Bapak Dirjen, Ibu Menteri.

Sebetulnya yang ingin kita di *update*, juga ada pertemuan G20 di Fukuoka terakhir. Yang pajak digital yang berkeadilan ini yang diharapkan itu, apa itu pembicaraan di Fukuoka sendiri dan apa langkah berikutnya bersama dengan G20 members ini. Dan kesiapan kita di dalam negeri itu apa, sehingga pro aktif kita agar kebijakan perpajakan digital ini menjadi lebih berkeadilan sebagaimana harapan di G20. Nah, ini kesiapan kita dan langkah kita apa, dan apa isi rapat-rapat atau kesepakatan di Fukuoka itu sendiri.

Terima kasih Pimpinan.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Pimpinan.

Tadi Kapoksi minta ijin satu lagi, penting, bukan soal kebijakan tapi soal teknis. Saya melihat disini di paper khususnya Satker, Sekretariat Jenderal, alokasi dananya kurang lebih 22,585 triliun dibandingkan dengan 2019 itu jauh lebih besar. Sementara program unggulan dan kegiatan dukungan saya lihat disini paling-paling pengembangan, koordinasi-koordinasi pengembangan renovasi, lanjutan pengembangan termasuk simplikasi, regulasi dibidang keuangan dan kekayaan

negara. Tadi saya lihat dengan alokasi sebesar ini dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini tolong lagi di-*break down*.

Kemudian Ibu Menteri yang terhormat, saya lihat disini tidak ada Bapak Harry disini Kepala Bea Cukai. Oh ada, maaf beliau ada disini. Platfon beliau mengalami kenaikan atau 3,291 tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 kurang lebih hampir 4 triliun atau 3,63. Dan kegiatan atau programnya itu sangat sedikit sekali termasuk saya melihat satu disini seperti begini, itu kegiatan saya hafal tadi melatih anjing pelacak. Kalau dana sebesar ini melatih anjing pelacak kira-kira berapa ratus kendang anjing pelacak, bapak lihat itu di kegiatan. Pengembangan dan penguatan unit anjing pelacak, Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Kira-kira berapa ratus kor anjing pelacak yang dilatih, hampir 3,7 triliun itu.

Yang berikutnya Bapak Pimpinan maaf Kapoksi, yang Komisi XI DPR RI bahas ini adalah satuan-satuan gelondongan. Sementara kalau APBN ini jalan Kementerian Lembaga pasti dan itu pasti akan melakukan penggeseran kegiatan dalam satu program. Pada titik ini kami awam, pada titik ini Komisi tidak tahu sama sekali apabila Kementerian/Lembaga dengan sangat terpaksa alasan *urgent*, alasan keinginan Presiden dan sebagainya dan harus melakukan pergeseran kegiatan dalam satu program itu yang kami tidak tahu.

Kami tidak masuk di wilayah itu lagi, sementara nanti kami akan melihat pada waktu BPK menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan sementara. Dan ini pembahasannya sifatnya gelondongan, yang lain-lain kita tidak tahu.

Jadi kami minta maaf Ibu Menteri, Kapoksi, Bapak Ketua, Fraksi Nasdem menyadari bahwa beban tugas dan kewenangan Kementerian yang satu ini cukup berat. Menurut saya pribadi dan Fraksi barangkali Kapoksi juga sependapat bahwa tidak ada masalah-masalah yang krusial, hanya persoalan teknis penganggaran termasuk di-*break down* angka-angka memang perlu diberikan pemahaman kepada kami.

Bapak Harry tadi berapa banyak ekor anjing yang harus dilatih, mau ambil anjing darimana sebesar itu. Di NTT pun mungkin tidak dapat itu anjing, Ternate apalagi Ternate tidak ada anjing. Jadi kalau Bapak mau latih anjing sekian ribu ekor ini dana 3,7 triliun barangkali 1 triliun atau 1,5 triliun sendiri harus melatih anjing, darimana anjing diambil. Cari di NTT, di Sangir pun tidak dapat anjing sebanyak itu. Minta maaf Ibu, ini hanya bikin suasana ini.

Terima kasih.

Bapak Dirjen Bea Cukai mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, masih ada lagi?
Bapak Haerul silakan.

F-P. GERINDRA (HAERUL SALEH, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.
Saya tambah sedikit.

**Pimpinan, rekan-rekan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,
Ibu Menteri Keuangan beserta seluruh jajaran.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Ini berkaitan dengan penerimaan negara, khusus kepada Bea Cukai juga yang berkaitan dengan anjing tadi. Saya kira benar juga bahwa Bea Cukai ini perlu melakukan peningkatan dalam peningkatan pengadaan fasilitas dalam rangka monitoring serta pengawasan terhadap potensi penerimaan negara. Khususnya kalau buat saya ini khususnya yang terjadi di bangsa ini berkaitan dengan masalah tambang. Mohon maaf mungkin Bapak Dirjen mungkin tidak tahu apalagi Ibu Menteri, bahwa disana itu ada tambang ini terjadi di depan mata saya soalnya. Tambang nikel yang diekspor dan tentu disitu ada tagihan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Bea Cukai dan sebagainya itu ada berapa. Tetapi kadang yang ditentukan oleh Undang-Undang itu atau peraturan yang sekarang ini adalah 1,7.

Nah, masalahnya kemudian kebocoran kita ada pada ketika nikel yang keluar itu jauh di atas 1,7 kadarnya. Artinya, salah satu fungsi pengawasan dan bea cukai disitu sangat berperan dalam menilai sebab disitu ada mekanismenya harusnya. Akan tetapi mekanisme itu tidak dilaksanakan dengan benar, sehingga kebocoran-kebocoran ini sudah terjadi selama kurang lebih 2 tahun dan saya tahu persis sebabnya. Mohon maaf, bayarnya dulu itu bayar saya dulu, jadi saya paham betul apa yang terjadi dan saya tahu juga ada beberapa orang terlibat sehingga ini juga bisa merupakan skandal besar. Hanya saja kan ini kita masih bisa bicarakan secara baik-baik kalau bisa fungsi daripada bea cukai ditingkatkan sehingga kebocoran ini bisa kita hindari setidaknya mulai besok, karena ini berjalan terus Pak.

Ibu Menteri, mohon maaf saya mungkin harus mengatakan ini sebab ini terjadi di kampung saya sendiri. Dan itu tentunya merupakan tanggungjawab kita terutama saya yang di Dapil Sulawesi Tenggara.

Saya kira itu saja Pimpinan, yang bisa saya tambahkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Bapak Heru silakan jelaskan anjingnya Pak.

DIRJEN BEA CUKAI:

Terima kasih Bapak Pimpinan.
Ijin Ibu Menteri.

Yang kami hormati Pimpinan, Anggota Komisi XI DPR RI.

Ijinkan kami menyampaikan beberapa tanggapan terkait dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, terkait dengan e-commerce, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Robert Papahan bahwa kami juga melihat bahwa di e-commerce ini ada dua aspek, ada peluang dan juga ada tentunya ada ancaman dalam konteks ekonomi. Yang terkait dengan peluang tentunya adalah bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk kepentingan peningkatan ekonomi di Indonesia sendiri. Kami fokus juga bagaimana layanan itu bisa kita lakukan dengan lebih baik.

Nah, kunci daripada layanan e-commerce dan juga pengawasan adalah bagaimana teknologi itu juga sekaligus kita *adopt*. Jadi kita tidak mungkin menolak teknologi tapi kita memanfaatkan teknologi. Dalam konteks layanan kami sudah mengembangkan yang kami sebut sebagai *fund manifes system*. Jadi barang itu sudah kami tahu sebelum barang itu datang. Sebenarnya ini juga kami sudah miliki sistem ini untuk orang juga Pak. Jadi aturannya kemudian menjadi barang harus sudah disampaikan, informasi barang sudah harus disampaikan kepada bea cukai sebelum barang itu nyampe di Indonesia. Tentunya ini adalah untuk kepentingan layanan supaya kita bisa memberikan *advance clearance* bagi perusahaan yang baik.

Kemudian juga yang kedua adalah dalam konteks layanan adalah bahwa prosedur-prosedur yang ada yang sebenarnya dikonstruksikan dengan *environment conventional* sudah mulai kita rubah, sehingga sudah menyertakan ke model-model bisnis yang baru dengan e-commerce ini. Kami mengajak para pelaku platform untuk bisa juga mengintegrasikan data, karena mereka basenya teknologi dan kita juga bisa memanfaatkan data.

Kami juga menyadari bahwa e-commerce juga ada tantangannya. Jadi kami bisa sampaikan bahwa ada satu orang yang melakukan transaksi 400 kali dalam sehari. Ini untuk menghindari kewajiban fiskal. Nah, kami juga sama menggunakan teknologi itu sendiri untuk mendeteksi dan kemudian mencegah ini. Kami sudah terapkan teknologi filtering supaya mereka itu juga tetap *comply* dengan pajak.

Yang berikutnya adalah tentunya kami mesti harus bisa membedakan dan kemudian memberikan label pink kepada pebisnis yang dalam negeri dan konvensional. Karena ini tadi arahnya pointnya seperti itu, sehingga kami menggunakan instrument fiskal untuk menyeimbangkan antara perkembangan teknologi e-commerce terutama barang-barang kiriman dengan retail dalam negeri. Nah, ini sudah kami *aware*.

Juga kerja sama dengan pajak, saya kira ini menjadi salah satu *policy* yang dominan dalam rangka mengharmonisasi antara aspek layanan dan pengawasan. Terkait dengan pertanyaan berikutnya mengenai anjing, Pak Hatari terima kasih konsennya. Tentunya 3,6 triliun tentunya bukan untuk anjing semua. Itu untuk satu Direktorat Jenderal Bea Cukai, mulai dari belanja barang pegawai, kemudian juga belanja modal.

Kira-kira gambarannya kenapa kita juga salah satu yang menjadi proyek unggulan adalah pengawasan narkoba, karena tahun kemarin kami menangkap 4,1ton sabu. Dan itu naik berlipat-lipat dari tahun ke tahun, maknanya bahwa Indonesia sudah menjadi target market daripada mafia narkoba. Salah satu tools yang efektif adalah tentunya anjing, sehingga kami melakukan peningkatan kapasitas baik dari sisi sarana dan prasarana, termasuk anjingnya sendiri. Jadi anjing ini

kebetulan memang kalau Bapak Hatari menyampaikan mungkin di Ternate karena memang mungkin fokusnya adalah di bandara, pelabuhan dan diperbatasan.

Kami mengembangkan 3 jenis deteksi anjing ini, yang pertama adalah untuk yang marine, kemudian untuk yang container, dan yang satu lagi adalah untuk yang border. Yang marine seperti kita tahu kemarin kita sudah menangkap 1,6 ton dan itu kami memberikan penghargaan kepada satu anjing karena memang dia berhasil mendeteksi.

F-P. GERINDRA (HAERUL SALEH, S.H.):

Kalau saya bisa tidak mendapatkan penghargaan juga, karena saya berhasil mencium itu ada kebocoran.

DIRJEN BEA CUKAI:

Nanti kalau Bapak Haerul kita siapkan medali yang lain Pak.

Kemudian yang terkait dengan sumber daya alam kami terima kasih dukungan dari Bapak Haerul. Kami kebetulan pernah menjadi Kakanwil di Makassar jadi kami paham juga. Dan saya kira memang kami akan kuatkan porsi daripada tanggung jawab dan kewajiban serta layanan antara surveyor dengan Bea Cukai. Kalau bicara mengenai kadar tentunya kami base-nya adalah laporan surveyor. *Up and down*-nya itu tentunya menjadi ranahnya daripada surveyor, sehingga terima kasih infonya Bapak Haerul. Jika tentunya ada sesuatu yang tidak pas tentunya kami akan coba komunikasikan dengan surveyor.

Yang kedua adalah yang ini saya kira efektif, kami sedang lakukan investigasi dan juga kemudian pengawasan yang ketat di batubara dengan bekerja sama antara bea cukai, pajak dan anggaran dengan penegak hukum yang lain terutama PPATK dan dengan supervisi KPK.

Demikian Bapak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Masih ada Ibu Menteri?

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Pimpinan, mohon ijin bicara.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Terima kasih.

Tadikan telah disampaikan oleh Ibu Menteri bahwa untuk tema kali inikan peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas. Mohon nanti

mungkin kami diberikan penjelasan yang lebih detail, tambahannya kan sekitar 4,2 triliun itu dari 2019 ke 2020. Dan saya senang karena disini yang bertambah diantaranya adalah tulang punggung negara ini ya, tulang punggung keuangan negara, backbond kita dari DJP dan DJBJ masing-masing 1 triliun. Dan kemudian untuk Kesekjenan bertambahnya 2 triliun.

Nah, tadi juga disampaikan oleh Ibu Menteri bahwa baseline untuk belanja barang itu di 2015. Kami minta tadi disampaikan oleh Bapak Melchias juga untuk dasar memutuskan SB ini adalah tentu saja kinerja keuangan dari masing-masing Kementerian/Lembaga termasuk didalamnya adalah DPR RI. Saya hanya ingin mengetahui selain itu apa kira-kira dasarnya selain tentang penyerapannya apakah sudah baik, kemudian apakah kinerja keuangan juga sudah baik, efisiensi dan produktifitas apakah sudah baik, termasuk didalamnya DPR RI mengingat opini yang terbentuk di publik selama ini bahwa DPR RI itu seolah-olah membuat Undang-Undang sendiri, menganggarkan sendiri, kemudian mengawasi sendiri. Banyak publik yang tidak menyadari bahwa kami pun ini anggaran kami pun itu diputuskan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Jadi saya mohon diberikan kriteria yang lebih jelas, mengapa Lembaga dan Kementerian diberikan pagu indikatif seperti itu. Contoh, DPR RI Dipa kita 2015 itu sudah mencapai 5 triliun dan sekarang DPR RI itu hanya diberikan usulan kami 47 sekian seingat saya, kemudian diberikan pagu indikatif oleh SB Kementerian Keuangan dan Bappenas sekitar 2156 kalau tidak salah. Sekitar segitu Bapak Johnny seingat saya, pokoknya 55% pangkasannya.

Nah, sementara kami itu di Satker Dewan ini kami juga menanggung biaya dari 4.500 staf dan tenaga ahli. Di dalam DPR RI ini kami juga memiliki anggaran untuk Satker Kesekjenan yang 1.200 lebih orang itu adalah Pegawai Negeri semuanya PNS disini. Jadi itu mungkin yang harus disampaikan dan masyarakat harus tahu bahwa DPR RI ini adalah mitra kerja dari Kementerian Keuangan, kami khususnya Komisi XI DPR RI.

Dan selama ini sudah belasan kali kita menyusun dan membahas RAPBN dan kemudian sampai RKAKL. Dan kami pun juga sama, kami juga ingi meningkatkan sumber daya manusia untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas, bukan bermaksud mencari kesalahan tetapi kami lihat bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Kementerian selama inikan memang tidak pernah mencapai target. Saya ada catatan dari tahun 2016 itu selalu meleset APBNP 2016 itu 5,2 realisasinya cuma 5,02 dan di tahun 2017 juga demikian, 2018 juga demikian, dan di kuartal I 2019 pun juga masih kita tidak melihat indikasi untuk pencapaian sesuai dengan target yang telah dicanangkan. Begitu juga dengan kinerja ekonomi kuartal I di periode yang sama dari 2018, 2019 dan di periode yang sama di kuartal 2017 pun itu kinerja ekspor juga tidak mencapai, semuanya turun drastis tetapi juga tetap mendapatkan anggaran yang meningkat setiap tahunnya.

Jadi saya ingin minta penjelasan melalui Pimpinan, bahwa mengapa penurunan anggaran itu begitu drastis tanpa mencermati kinerja dan pencapaian atau penyerapan yang telah dilakukan. Kami pun juga mendapatkan WTP selama 11 kali berturut-turut.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

F-PKS (H. REFRIZAL):

Tambah sedikit Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKS (H. REFRIZAL):

Terima kasih Bapak Ketua.

Ketua, Ibu dan Bapak Anggota Komisi XI DPR RI, Ibu Menteri, Bapak Wamen, Bapak Dirjen, seluruh jajaran yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama saya senang mitra kita Kementerian Keuangan naik pagu indikatif sekitar kurang lebih Rp4 triliun. Memang bernegara seharusnya begitu Pak, kalau turun berarti kita pesimis dalam pencapaian capaian yang akan datang. Saya masuk DPR RI dulu Pak, APBN kita baru Rp650 triliun, artinya kita kan setiap tahun ada kenaikan APBN, sekarang sudah lebih dari Rp2000 triliun. Sudah barang tentu Kementerian apalagi Kementerian Keuangan sebagai tulang punggung pendapatan negara sudah tentu harus diapresiasi untuk naik. Itu yang pertama.

Yang kedua, lembaga negara ini diluar Kementerian kan ada DPR, ada DPD, ada MPR, ada BPK, ada MK, ada MA, yang lain berdiri berdasarkan Undang-Undang, ada KPK, ada Yudisial dan sebagainya. Dari lembaga yang ada di Undang-Undang Dasar dulu saja saya tanya seperti DPR, MPR, DPD itu ada di Undang-Undang Dasar, MA, BPK dan MK. Saya ingin tahu postur pagu mereka ini seperti apa, saya dengar BPK juga protes ini termasuk saya tidak tahu belum kepastiannya seperti apa, maka saya tanya dengan Menteri Keuangan ini. Dengan anggaran postur yang diberikan sekarang ini setahu saya BPK ini yang saya dengar tadi dengan kita kumpul-kumpul dengan Pimpinan DPR tadi dengan BPK termasuk juga protes dengan pidato Ketua DPR RI tadi. BPK juga termasuk lembaga negara yang protes dipotong anggarannya. Makanya saya ingin tahu lembaga negara mana saja dan berapa yang dipotong anggarannya. Nah, ini yang saya ingin jelas dan alasannya seperti apa untuk memotong itu.

Itu BPK termasuk mitra kita juga ya, kalau BI sudah jelas mitra kita tetapi dia tidak dapat APBN, OJK tidak APBN, yang pakai APBN ini LKPP, BPK, nanti kami di Komisi XI DPR RI juga akan membahas mereka secara satu per satu termasuk Bappenas. Kalau Bappenas saya kira tidak ada masalah karena dia yang akan menentukan pagu indikatif bersama Kementerian Keuangan. Biasanya yang masalah itu kayak LKPP, BPK, dan itu yang kami juga membahas satu per satu nanti. Ini saya ingin tahu jawaban dari Kementerian Keuangan, tadi juga Bapak Ketua dan rekan-rekan bagian siapa yang motong-motong. Karena di Undang-Undang MD3 ini kan kita pada hakekatnya rapat dengan Menteri ini rapat dengan Presiden yang dapat diwakilkan kepada Menteri. Harusnya kita DPR RI ini rapatnya dengan Presiden Pak,

yang dapat diwakilkan kepada Menteri. Apakah pemotongan-pemotongan itu apalagi khususnya lembaga DPR RI, lembaga legislatif telah diketahui oleh Bapak Presiden atau belum.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Pimpinan, mohon ijin tambahan.

KETUA RAPAT:

Ini sudah jam 13.30 WIB mendingan kita skors 10 menit terus kita mulai lagi.

F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Satu menit saja Pimpinan.

Terima kasih.

Kepada Ibu Menteri ini saya ingin menyampaikan masukan saja dari Dapil saya. Banyak keluhan dari para tengkulak tembakau, saya tidak tahu ini masukan dari sector informal maupun formal karena mereka perorangan bukan badan usaha. Mereka ada keluhan karena untuk membayar pajak itu mengalami kesulitan karena istilah-istilah yang terlalu teknis ya, akuntansi. Jadi ada baiknya karena ini juga potensi wajib pajak yang cukup besar di daerah kami. Saya ambil contoh misalnya istilah pajak terhutang, mereka ini tidak bisa menangkap itu maksudnya apa. Mungkin kalau digunakan istilah yang lebih mudah dipahami mungkin akan lebih mudah dipahami mungkin akan lebih mudah.

Jadi mereka itu ingin membayar pajak tetapi seringkali mengalami dispute dengan petugas pajak karena istilah-istilah yang mereka tidak pahami. Mungkin bisa disederhanakan formulir pajak karena pada umumnya mereka itu kurang bisa memahami istilah-istilah yang terlalu teknis. Itu yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti atau kalau pun tidak bisa ada perubahan penyuluhan mengenai perpajakan ini bisa digalakkan tanpa memberikan akses yang berlebihan kepada para wajib pajak yang selama ini mungkin belum terjangkau, karena di daerah tembakau ini sebenarnya potensi ekonominya cukup besar. Dan mereka kesulitan di dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, kita skors ya 10 menit supaya bisa menyamakan persepsi dan kita bisa ambil keputusan.

F-PKS (H. REFRIZAL);

Kesempatan untuk sholat Pak, sekalian 10 menit.

KETUA RAPAT:

Bisa ya Ibu Menteri, 10 menit saja terus kita mulai lagi untuk ambil keputusan. Rapat saya skors.

(RAPAT DISKORS 10 MENIT)

Mungkin masih ada beberapa jawaban yang ingin Ibu Menteri sampaikan. Kami persilakan.

MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI):

Baik, Pimpinan.

Tadi Bapak Johnny Plate menanyakan mengenai G20, mungkin kami akan sampaikan sedikit oleh-olehnya sesuai sebagian juga untuk memberikan update kepada Dewan.

Pertama, G20 yang kami sampaikan di public bahwa pertemuan G20 saat ini sangat berguna bagi kita sebagai Indonesia, karena untuk satu topik saja terutama adalah yang menyangkut masalah international tax corporation. Ini sangat berguna karena dia menyangkut bagaimana negara-negara bisa mendapatkan potensi penerimaan perpajakan dengan adanya fenomena digital ekonomi yang tadi disampaikan oleh Bapak Robert.

Ada dua hal yang kami ingin sampaikan dalam kerja sama perpajakan internasional ini difokuskan untuk bagaimana negara-negara bisa mencegah terjadinya erosi basis perpajakan. Jadi *base erosion profit shifting bach* yang sudah disetujui sejak tahun 2012 sebetulnya sudah mulai dibahas tetapi persetujuan mengenai prinsip-prinsipnya itu baru sekitar 2 tahun yang lalu, sekarang sudah masuk kepada masalah yang makin teknis. Jadi bagaimana negara bisa melindungi basis pajaknya supaya tidak tererosi karena orang atau subyek pajak itu berpindah memindahkan aktifitas atau profitnya ke yuridiksi lain yang memiliki tingkat pajak lebih rendah atau bahkan tidak ada pajaknya sama sekali yang disebut *tax haven jurisdiction* ini.

Nah, untuk fenomena ini akan dilakukan *approach* yang disebut *minimum effective taxation*. Jadi kalau satu negara misalnya di Indonesia korporasi harus membayar PPH 25%. Terus dia pergi ke *jurisdiction* yang bahkan pajaknya mendekati 0, itu tidak lagi diperbolehkan karena berarti si perusahaan tersebut menghindari kewajiban pajak secara internasional sampai dia akhirnya hampir tidak membayar pajak sama sekali.

Jadi untuk hal tersebut akan dihadapi dengan suatu kesepakatan agar suatu negara bisa memproteksi tingkat pajak yang harusnya secara *fair di-share* untuk mereka. Atau perusahaan-perusahaan yang mencoba menghindari pajak itu tetap dikenakan pajak yang disebut *minimum effective taxation*, sehingga dia tidak bisa menghindari walaupun dia pindah ke *jurisdiction* yang pajaknya sangat rendah dia harus membayar yang disebut *minimum effective taxation*. Itu berarti ini sebetulnya untuk mencoba menghindari negara-negara *race to the bottom*. Mengurangi pajak-pajaknya sampai 0 untuk menarik investasi, sekarang tidak boleh lagi itu dilakukakan.

Yang kedua, mungkin untuk Bapak Johnny Plate. Memahami bahwa ekonomi digital itu menghilangkan atau melemahkan prinsip perpajakan yang berdasarkan BUT atau yang disebut *permanent establishment* atau badan usaha tetap. Kalau dia beroperasi di Indonesia dia harus memiliki entitas di Indonesia, sehingga dia punya BUT atau *permanent establishment* yang kemudian di subyeknya ini harus membayar pajak berdasarkan volume aktifitas yang ada di negara tersebut.

Dengan ekonomi digital dia tetap bisa dari *headquarter*-nya mungkin di Amerika, facebook atau google atau yang lain. Dan di negara-negara itu dia beroperasi tanpa harus menghadirkan BUT, karena dia tidak perlu lagi digital ekonomi semuanya menggunakan infrastruktur digital, sehingga secara fisik tidak perlu harus hadir. Ini yang menyebabkan dalam tren ekonomi digital negara-negara akan kesulitan memungut pajak kalau basisnya adalah BUT. Oleh karena itu, di dalam digital ekonomi ini akan dilakukan prinsip baru tidak berdasarkan *physical presence*, yaitu kehadiran secara fisik, yaitu BUT tadi atau *permanent establishment*. Tapi pajaknya akan dihitung berdasarkan *economic presence* atau *economic relevance*. Jadi walaupun perusahaannya tidak ada disini, tidak punya kantor cabang ataupun *permanent establishment*, namun kalau dia kegiatannya disini menghasilkan *revenue* penerimaan yang banyak, penerimaannya itulah yang dihitung, itu yang disebut *economic presence*-nya ada walaupun perusahaannya tidak disini. Prinsip ini yang akan dimatangkan oleh G20 melalui OECD sebagai sekretariat dari sisi *international taxation* ini. Ini yang dalam kamusnya G20 disebut *the new nexus* atau nexus baru, karena tidak lagi berdasarkan *physical presence* tetapi berdasarkan *economic presence*-nya.

Yang ketiga, mungkin ini masih belum in banget akan tetapi Perancis sangat mem-promote adalah mereka menghendaki adanya pajak untuk penggunaan data, karena *digital economy* all basisnya adalah mengenai data. Data individual sekarang yang disebut sebagai *the new mainning* atau tambang baru. Kalau dulu tambang itu adalah tambang emas, boksit dan segala macam sekarang yang namanya sumber penghasilan adalah big data itu. Nah, Perancis sekarang ini sudah memungut pajak untuk company manapun yang menggunakan big data yang di-*collect* dari Perancis. Ini masih sama sekali belum disepakati.

Namun saya ingin sampaikan bahwa dari G20 ini seluruh negara setuju untuk prinsip-prinsip tersebut untuk dimatangkan selama setahun kedepan. Nanti *host* kedepan sesudah Jepang adalah Saudi Arabia, disitu diharapkan nanti kesimpulan mengenai *the new nexus* ini yang tidak lagi berdasarkan *physical presence* tetapi *economic presence* dan tadi yang berdasarkan menerapkan *minimum effective taxation* diharapkan bisa disepakati prinsip-prinsip yang untuk operasionalnya. Sehingga dua pilar tersebut, yaitu *minimum effective taxation* dan untuk mencegah tadi *base erosion* melalui *the profit allocation* bisa disepakati.

Kalau itu terjadi jadi orang tidak lagi atau antar negara tidak lagi terjadi perseteruan. Dia harus bayar pajak di negara ini berapa, karena misalnya satu perusahaan multi nasional dia beroperaasi global dia akan tahu yang berasal profitnya yang berasal dari Indonesia berapa, dari India berapa, dari Malaysia berapa dan porsi *headquarter*-nya sendiri berapa sehingga *profit allocation* itu bisa disepakati dan kemudian tiap-tiap *profit allocation* itu subjek to pajak di masing-masing *jurisdiction* itu.

Mungkin itu Pimpinan, Bapak Johnny Plate terutama untuk G20. Kami dengan antisipasi ini makanya tadi yang disampaikan oleh Bapak Robert dalam pertemuan G20 sekarang rombongan Kemenkeu selalu ditambahkan teman-teman dari pajak. Tidak hanya yang *international taxation* tetapi kami juga meminta dari Direktur Peraturan Pajak, karena supaya mereka antisipasi terhadap dinamika pembahasan sehingga mereka bisa melakukan antisipasi bagaimana perubahan peraturan-peraturan perpajakan dan *compliance* yang harus dipenuhi.

Mungkin itu Bapak Melchias dan Pimpinan, serta Anggota yang terhormat.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Artinya KUP ini mesti di-*revise* kalau lihat pembahasan ini.

MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI):

PPH, PPN dan KUP Pak.

KETUA RAPAT:

Iya, karena yang ada itu kan masih BUT, jadi *base on location*.

MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI):

Betul, bilateral *tax agreement* yang selama ini kita tandatangani juga akan berubah Pak, karena banyak *bilateral tax agreement* itu semuanya basisnya adalah BUT.

KETUA RAPAT:

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Kalau bisa kita ambil kesimpulan saya bacakan ya mungkin ditampilkan. Baik, kesimpulan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan.

1. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp44.394.219.307.000,- dengan rincian per eselon I sebagai berikut:
 - Sekretariat Jenderal Rp22.585.031.000.000,-
 - Inspektorat Jenderal Rp107.520.000.000,-
 - Direktorat Jenderal Anggaran Rp124.659.000.000,-
 - Direktorat Jenderal Pajak Rp7.943.239.000.000,-
 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rp3.638.282.000.000,-
 - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Rp106.420.000.000,-
 - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Rp113.426.000.000,-
 - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Rp8.090.679.000.000,-

- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Rp769.773.000.000,-
 - Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Rp666.484.000.000,-
 - Badan Kebijakan Fiskal Rp127.145.000.000,-
 - Lembaga Nasional Single Window Rp121.556.000.000,-
- Totalnya Rp44.394.219.307.000,-

Bisa disetujui?

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Sabar Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Itu kurang itu, itu perlu ditambahkan dari Rupiah Murni berapa, hutang luar negeri atau apa, hibah atau apapun, porsi luar negeri berapa, dan BLU berapa, karena itu sudah termasuk BLU, BLU dapat berapa triliunkira-kira Ibu ya. Jadi 35 triliun, 8 triliun, dan 27 miliar kalau tidak salah itu angkanya. Itu perlu ditambah itu.

MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI):

Mungkin ditambahkan terdiri dari 35, 621, yang ada di kesimpulan rapat terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp35.621.702.307.000,- kemudian BLU sebesar Rp8.745.437.000.000,- dan hibah luar negeri sebesar Rp27.080.000.000,-.

KETUA RAPAT:

Iya, bisa disetujui ya?
Pemerintah setuju ya?

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Sebentar Pimpinan.

Ibu Menteri, 44,384 perlu dicantumkan juga bahwa jumlah sebesar itu termasuk *include adri 4 item* termasuk PIP. Inikan sumber dana.

MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI):

Di dalam BLU Pak.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

LPDP, PIP.

MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI):

Iya Pak, itu ada disitu Pak.

KETUA RAPAT:

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi XI DPR RI meminta kepada Kementerian Keuangan untuk mereview kembali pagu anggaran Kementerian Keuangan secara lebih proporsional sesuai dengan arah kebijakan belanja negara tahun 2020 sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta rencana pencapaian target kinerja Kementerian Keuangan.

Bisa disetujui?

MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI):

Kami akan mengusulkan “mereview kembali pagu anggaran Kementerian Keuangan dengan prinsip efisiensi, efektifitas penggunaan anggaran di dalam rangka untuk mencapai rencana pencapaian kinerja Kementerian Keuangan”. Kalau pun mau ditambahkan “alokasi belanja Kementerian Keuangan harus sesuai dengan prioritas dan arah kebijakan belanja negara di tahun 2020”. “harus sesuai”, diatasnya kurang, “alokasi belanja Kementerian”. Mungkin supaya lebih sempurna karena kita baru bicara tentang pagu indikatif jadi mereview kembali pagu indikatif anggaran, anggarannya tetap sama. Itu antara Kementerian Keuangan titik, harus ada titiknya Pak, alokasi belanjanya.

KETUA RAPAT:

Jadi saya bacakan kembali.

2. Komisi XI DPR RI meminta kepada Kementerian Keuangan untuk mereview kembali pagu indikatif anggaran Kementerian Keuangan dengan prinsip efisiensi, efektifitas penggunaan anggaran di dalam rangka untuk pencapaian kinerja Kementerian Keuangan. Alokasi belanja Kementerian Keuangan harus sesuai dengan prioritas dan arah kebijakan belanja negara tahun 2020.

Bisa disetujui ya?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Kita sudah mengambil kesimpulan dan kita akan mengakhiri Rapat Kerja pada siang hari ini.

Kami persilakan kepada Menteri Keuangan untuk *closing remarks*.

MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI):

Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.

Terima kasih atas pembahasan yang sangat produktif dan sangat konstruktif DPR RI dari seluruh Pimpinan dan Anggota terhadap pagu indikatif anggaran Kementerian Keuangan. Kami berjanji akan terus melakukan optimalisasi dari efisien dan efektifitas penggunaan anggaran di dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Terima kasih kepada Menteri Keuangan beserta jajarannya atas penjelasan dan kehadirannya. Dengan demikian Rapat Kerja saya tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.15 WIB)

Jakarta, 18 Juni 2019

a.n. Ketua Rapat

Sekretaris Rapat

ttd

Drs. Urip Soediarwono
NIP. 19620521 198203 1 001